



**LPPPD**  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tahun 2020



**BUPATI SUMENEP**

**LPPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Tahun 2020

## **PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini.

Sumenep, 25 Maret 2021

**INSPEKTUR  
KABUPATEN SUMENEP**



**R. TITIK SURYATI, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660409 199302 2 002

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah yang merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit dan komprehensif dengan prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagai pengejawantahan berbagai langkah kebijakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 kepada Pemerintah ini disampaikan kepada Pemerintah / Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur didalamnya memuat berbagai pelaksanaan kebijakan dan program yang secara teknis yang dilaksanakan oleh Badan, Dinas, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep secara garis besar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 dengan 6 prioritas program sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi local yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan dan Budaya serta Nasionalisme yang Didukung Kearifan Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 masih jauh dari sempurna, oleh karenanya diharapkan sumbang saran dan masukan yang lebih konstruktif guna penyempurnaan penyusunan laporan - laporan selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan LPPD ini baik Badan, Dinas, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga kedepan kita akan menjadi lebih baik.

Sumenep, 25 Maret 2021

 **BUPATI SUMENEP**  
  
**ACHMAD FAUZI, SH, MH**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	10
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	20
<b>BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	23
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	25
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	25
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	55
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	61
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	62
<b>BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten .....	152
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten .....	155
3.3 Permasalahan.....	156
3.4 Saran dan Tindak Lanjut .....	156
<b>BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	
4.1 Urusan Pendidikan .....	157
4.2 Urusan Kesehatan .....	161
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	174

4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	177
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	180
4.6 Urusan Sosial .....	189
4.7 Program dan Kegiatan .....	192
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>197</b>

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Penjelasan Umum

##### a) Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 09)

##### b) Data Geografis Wilayah

###### 1. Luas Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang berada di Pulau Madura yang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak diujung timur Pulau Madura dengan luas wilayah admisnistrasi seluas 2.093,47 Km<sup>2</sup> terdiri dari wilayah Daratan dan Kepulauan, dengan luas wilayah perairan ± 50.000 km<sup>2</sup>.

Gugusan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep, pulau yang terjauh/paling utara adalah pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ± 151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Kalimantan Selatan.

Sedangkan pulau paling timur adalah pulau Sakala terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak ± 165 mil laut dari pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Secara Geografis Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 bagian :

- ~ Bagian daratan dengan luas 1.146,927065 Km<sup>2</sup> (54,79%) terbagi atas 18 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan : Ambunten; Batang-batang; Batu Putih; Bluto; Dasuk; Dungkek; Ganding; Gapura; Guluk-guluk; Kalianget; Lenteng; Manding; Pasongsongan; Pragaan; Rubaru; Saronggi, Batuan dan Sumenep.

- ~ Bagian kepulauan dengan luas 946,530508 Km<sup>2</sup> (45,21%) terbagi atas 9 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan : Arjasa; Gayam; Giligenteng; Masalembu; Nonggunong; Raas; Sapeken, Kangayan dan Talango.

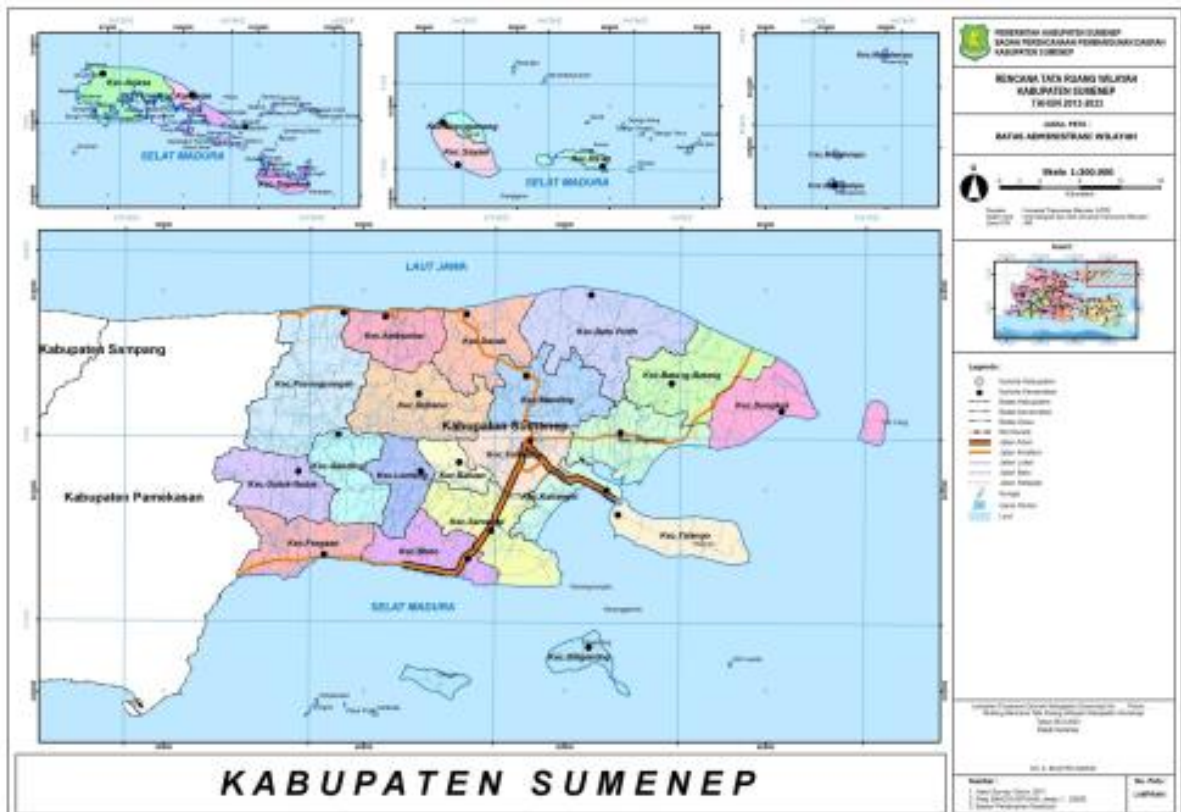
## 2. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten kepulauan yang terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur : Laut Jawa/Laut Flores

**Gambar 1.1**

### **Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep**



Sumber : RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033

### c) Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil susenas 2020 (Sumber : Disduk & Capil) jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.138.168 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 549.301 jiwa (48,59%) dan perempuan sebanyak 588.867 jiwa (51,41%), dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 90,75%, sedangkan kepadatan penduduk rata-rata 526 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sumenep tinggal di wilayah daratan sebesar 852.034 jiwa (82,15%), sedangkan sisanya tinggal di wilayah kepulauan sebesar 274.690 jiwa (28,85%).

Secara keseluruhan jumlah penduduk tertinggi wilayah daratan terdapat di Kecamatan Kota sebanyak 76.575 jiwa (6,44%), dengan kepadatan Penduduk sebesar 2.541 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batuan sebanyak 13.210 jiwa (1,09%), dengan kepadatan Penduduk sebesar 446 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk tertinggi Wilayah Kepulauan terdapat di Kecamatan Arjasa sebanyak 85.790 jiwa (6,48%), dengan Kepadatan Penduduk 247 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Nonggunong sebanyak 13.965 jiwa (1,28%), dengan Kepadatan Penduduk 329 jiwa/Km<sup>2</sup>.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KOTA SUMENEP	24.574	36.761	39.001	75.762
2	KALIANGET	15.029	20.607	21.833	42.440
3	MANDING	9.392	14.321	15.515	29.836
4	TALANGO	13.884	17.868	20.877	38.745
5	BLUTO	15.475	23.228	24.447	47.675
6	SARONGGI	13.104	17.954	19.674	37.628
7	LENTENG	19.636	29.669	31.885	61.554
8	GILIGENTING	8.243	11.370	12.788	24.158
9	GULUK GULUK	14.721	24.155	25.973	50.128
10	GANDING	11.211	17.500	18.927	36.427
11	PRAGAAN	21.616	32.381	34.299	66.680
12	AMBUNTEN	14.121	19.018	21.296	40.314

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
13	PASONGSONGAN	15.658	25.657	26.651	52.308
14	DASUK	10.159	14.563	15.716	30.279
15	RUBARU	11.579	18.966	20.555	39.521
16	BATANG BATANG	18.792	26.414	28.534	54.948
17	BATUPUTIH	14.969	20.892	22.962	43.854
18	DUNGKEK	13.873	17.120	19.238	36.358
19	GAPURA	12.774	17.864	19.499	37.363
20	GAYAM	13.625	15.292	17.273	32.565
21	NONGGUNONG	5.825	6.575	7.295	13.870
22	RAAS	14.413	19.606	20.654	40.260
23	MASALEMBU	8.973	12.959	13.478	26.437
24	ARJASA	31.555	43.201	43.986	87.187
25	SAPEKEN	16.401	25.853	26.234	52.087
26	BATUAN	4.433	6.495	6.797	13.292
27	KANGAYAN	9.938	13.012	13.480	26.492
<b>JUMLAH</b>		<b>383.973</b>	<b>549.301</b>	<b>588.867</b>	<b>1.138.168</b>

#### d) Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Secara Administratif Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas :

- a) 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan terdiri dari :
  - ~ 18 Kecamatan Daratan
  - ~ 9 Kecamatan Kepulauan
- b) 334 (Tiga ratus tiga puluh empat) Desa terdiri dari :
  - ~ 260 Desa di wilayah daratan
  - ~ 70 Desa di wilayah kepulauan
- c) 4 (empat) Kelurahan di wilayah daratan.
- d) 1547 (Seribu Lima ratus empat puluh tujuh) Dusun.
- e) 5569 (Lima ribu lima ratus enam puluh sembilan) RT.
- f) 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) RW.

**Tabel**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep**

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km <sup>2</sup> )
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	16	40	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-Guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batuputih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	48	201,89
	<b>JUMLAH</b>	<b>334</b>	<b>1.547</b>	<b>2.093,47</b>

**e) Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	STAF	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN	21	4011	581	4.613
2	DINAS KESEHATAN	90	1259	478	1.827
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17	2	94	113
4	DINAS PU BINA MARGA	15	4	55	74
5	DINAS PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR	13	6	69	88
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & CIKAR	17	2	55	74
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	20	-	22	42
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13	-	21	34
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	16	-	11	27
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	21	-	40	61
11	DINAS TENAGA KERJA	16	1	24	41
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	20	-	28	48
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK & KB	14	-	35	49
14	DINAS PERHUBUNGAN	21	2	65	88
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21	9	32	62
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16	-	23	39
17	DINAS SOSIAL	22	-	26	48
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12	4	14	30
19	DINAS PERIKANAN	22	-	17	39
20	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	20	48	74	142
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22	-	52	74
22	SEKRETARIAT DAERAH	43	2	168	213
23	SEKRETARIAT DPRD	14	-	54	68

NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	STAF	TOTAL
24	INSPEKTORAT	9	26	27	62
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10	-	67	77
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23	3	28	54
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	21	-	56	77
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	-	17	29
29	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH	25	3	58	86
30	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12	-	18	30
31	KECAMATAN KOTA	28	-	31	59
32	KECAMATAN KALIANGET	8	-	18	26
33	KECAMATAN TALANGO	9	-	11	20
34	KECAMATAN MANDING	9	-	19	28
35	KECAMATAN BLUTO	9	-	18	27
36	KECAMATAN SARONGGI	9	-	15	24
37	KECAMATAN LENTENG	8	-	13	21
38	KECAMATAN GILIGENTING	8	-	9	17
39	KECAMATAN GULUK-GULUK	8	-	8	16
40	KECAMATAN GANDING	9	-	12	21
41	KECAMATAN PRAGAAN	9	-	15	24
42	KECAMATAN RUBARU	8	-	12	20
43	KECAMATAN AMBUNTEN	8	-	15	23
44	KECAMATAN PASONGSONGAN	9	-	6	15
45	KECAMATAN DASUK	7	-	14	21
46	KECAMATAN BATANG2	9	-	18	27
47	KECAMATAN BATUPUTIH	8	-	16	24
48	KECAMATAN GAPURA	9	-	17	26
49	KECAMATAN DUNGKEK	8	-	13	21
50	KECAMATAN GAYAM	8	-	19	27
51	KECAMATAN NONGGUNONG	8	-	13	21
52	KECAMATAN RA'AS	8	-	8	16
53	KECAMATAN MASALEMBU	8	-	6	14
54	KECAMATAN ARJASA	8	-	22	30
55	KECAMATAN SAPEKEN	7	-	12	19
56	KECAMATAN BATUAN	9	-	14	23
57	KECAMATAN KANGAYAN	9	-	9	18
<b>JUMLAH</b>		<b>863</b>	<b>5.382</b>	<b>2.692</b>	<b>8.937</b>

## f) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	240.647.035.200,63	263.257.990.470,67
411	Hasil Pajak Daerah	28.136.500.000,00	32.365.904.163,00
412	Hasil Retribusi Daerah	18.454.432.704,00	18.107.753.256,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.822.662.838,22	15.822.662.838,22
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	178.233.439.658,41	196.961.647.760,45
42	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.492.972.084.702,00	1.487.090.215.701,00
421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	104.284.725.885,00	102.687.153.173,00
422	Dana Alokasi Umum	1.106.373.716.000,00	1.090.899.516.000,00
423	Dana Alokasi Khusus	282.313.642.817,00	293.503.546.528,00
43	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	536.430.044.926,00	537.253.135.563,00
431	Pendapatan Hibah	67.778.000.000,00	41.288.410.000,00
433	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	76.457.014.326,00	104.085.089.163,00
434	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	367.104.745.000,00	367.239.350.800,00
435	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.090.285.600,00	24.640.285.600,00
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	2.270.049.164.828,63	2.287.601.341.734,67
5	<b>BELANJA DAERAH</b>		
51	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.815.701.601.356,04	1.621.666.576.970,11
511	Belanja Pegawai	980.302.186.924,04	847.647.345.478,35
514	Belanja Hibah	198.902.508.300,00	192.302.292.300,00
515	Belanja Bantuan Sosial	14.960.050.000,00	14.197.450.000,00
516	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504,00	2.004.732.906,71
517	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota & Pemerintahan Desa	511.910.093.420,00	507.497.188.380,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI
518	Belanja Tidak Terduga	107.307.198.208,00	58.017.567.905,05
52	BELANJA LANGSUNG	1.071.393.220.034,93	874.301.414.170,76
521	Belanja Pegawai	29.489.953.239,79	23.001.098.149,00
522	Belanja Barang Dan Jasa	625.894.146.725,02	494.849.121.398,32
523	Belanja Modal	416.009.120.070,13	356.451.194.623,44
	Jumlah BELANJA DAERAH	2.887.094.821.390,97	2.495.967.991.140,87
	Surplus / (Defisit)	-617.045.656.562,34	-208.366.649.406,20
6	PEMBIAYAAN		
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	717.045.656.562,34	742.374.231.933,34
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	667.167.452.762,34	667.167.452.762,34
612	Pencairan Dana Cadangan	49.878.203.800,00	50.000.000.000,00
615	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	206.779.171,00
617	Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	0,00	25.000.000.000,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	717.045.656.562,34	742.374.231.933,34
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00
621	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
4	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00
41	Pembiayaan Netto	617.045.656.562,34	667.374.231.933,34
411	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	459.007.582.527,14

### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Beberapa permasalahan strategis di Kabupaten Sumenep secara umum dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin dengan masih banyaknya persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Persoalan di bidang pendidikan masih perlu dibenahi, baik dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata antara wilayah daratan dan kepulauan, juga akses dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan umumnya masih rendah
3. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. masih rendahnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, sehingga menghambat kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Belum terwujudnya kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Hal ini tercermin dari kurang profesionalnya Aparatur Sipil Negara, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, dan belum optimalnya pelayanan publik.
5. Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
6. Masih adanya budaya masyarakat terutama di pedesaan yang main hakim sendiri dalam menyelesaikan konflik.

## **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

### **1. Visi**

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh Karena itu, Visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. Sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. Sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan Visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah kedepan, maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah :

## “SUPER MANTAP”

*Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”*

### 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut telah dirumuskan Misi pembangunan yang akan dilaksanakan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar, Misi Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;
- Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) serta lingkungan;
- Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang unggul Berdaya Saing Tinggi;
- Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan *Accountable*;
- Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif melalui Partisipasi Masyarakat serta *Stakeholder* dalam Proses Pembangunan;
- Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta Nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dapat terwujud. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan gambaran arah kebijakan pada pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pencapaian misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan;
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
  - a. Meningkatkan perekonomian daerah;
4. Tujuan dari misi 4 adalah :
  - a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
5. Tujuan dari misi 5 adalah :
  - a. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;
  - b. Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
6. Tujuan dari misi 6 adalah :
  - a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal;

**c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah**

Sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 program pembangunan Kabupaten Sumenep terdiri dari :

**❖ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
  - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
  - b. Program Penyelenggaraan Jalan
  - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - d. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - g. Program Pengembangan Permukiman
  - h. Program Penataan Bangunan Gedung
  - i. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
  - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
- a. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
  - b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**
- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - b. Program Penanggulangan Kebakaran
  - c. Program Penanggulangan Bencana
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**
- a. Program Pemberdayaan Sosial
  - b. Program Rehabilitasi Sosial
  - c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
  - d. Program Penanganan Bencana
  - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

❖ **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

**4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

**7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

**8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- b. Program Pengelolaan Pelayaran
- c. Program Pengelolaan Penerbangan

**9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

**10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

f. Program Pengembangan Umkm

**11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

b. Program Promosi Penanaman Modal

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

**12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga**

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

**13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

**14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

**15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

a. Program Pengembangan Kebudayaan

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

c. Program Pembinaan Sejarah

d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

e. Program Pengelolaan Permuseuman

**16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

a. Program Pembinaan Perpustakaan

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

**17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

a. Program Pengelolaan Arsip

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

❖ **Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Penyuluhan Pertanian
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- h. Program Perizinan Usaha Pertanian
- i. Program Penyuluhan Pertanian

**4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

**7. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- d. Program Penataan Administrasi Umum
- e. Program Layanan Dan Administrasi Keuangan
- f. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

❖ **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1. Perencanaan**

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
- c. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
- d. Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan

**2. Keuangan**

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

**3. Kepegawaian**

- a. Program Kepegawaian Daerah

**4. Pendidikan Dan Pelatihan**

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

**5. Penelitian Dan Pengembangan**

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

❖ **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

**1. Inspektorat Daerah**

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

## ❖ Unsur Kewilayahan

### 1. Kecamatan

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Rencana kegiatan pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 berdasarkan Urusan kami sajikan dalam Tabel 1.16 sebagai berikut terlampir dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

#### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring

secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut hasil Capaian kinerja makro di Kabupaten Sumenep mulai pada tahun 2019 dan 2020 :

No	Indikator Kinerja Makro	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66.22	66.43	0.21
2	Angka Kemiskinan	19.48	20.18	0.7
3	Angka Pengangguran	2.17	2.84	0.67
4	Pertumbuhan Ekonomi	0.14	-1.13	-1.27
5	Pendapatan Per kapita	30.58	-	(Th 2020 blm rilis)
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.314	0.318	0.004

#### 1. Indeks pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia kabupaten sumenep sebesar 66,43% untuk tahun 2020 hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang hanya sebesar 66,22% namun kenaikan ini masih tetap pada kategori kelompok sedang. Jika dibandingkan dengan kabupaten di Madura, kabupaten Sumenep menempati urutan pertama, sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten se Jawa Timur, Kabupaten Sumenep masih menduduki peringkat 32. Hal ini masih perlu menjadi perhatian, tidak hanya dari segi angka tapi harus sejalan dengan kondisi di lapangan sehingga perlu peningkatan kerjasama antar dinas untuk meningkatkan status kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep.

2. Angka Kemiskinan.

Indikator angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep mengalami lonjakan sekitar 0,7% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatnya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep sebagai imbas dari pandemi covid-19 yang melanda dunia. Meningkatnya angka kemiskinan juga dipicu oleh tingkat pengangguran yang juga naik.

3. Angka Pengangguran

BPS mencatat bahwa angka pengangguran pada tahun 2020 yang ada di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan sekitar 0,67% jika dibandingkan dengan tahun 2019. meningkatnya pengangguran tersebut disebabkan pandemi yang menyebabkan banyak sektor usaha yang terganggu.

4. Pertumbuhan ekonomi

Capaian Kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 semakin melambat dan terrealisasi sebesar -1,13%. Tingkat kerendahan yang dialami akibat pandemi Covid-19 yang mewabah. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan juga bertambah.

Penurunan ekonomi tersebut dapat dilihat melalui minimnya pasokan yang ada, ditambah terhambatnya distribusi barang dan jasa, apalagi pendapatan masyarakat yang semakin menurun akibat pandemi.

5. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu Daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan Kabupaten dengan jumlah penduduk Kabupaten.

Tercatat bahwa pada tahun 2019 pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep mencapai 30,58% dan untuk tahun 2020 masih belum dirilis.

6. Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio merupakan alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2019 Kabupaten Sumenep memperoleh capaian sebesar 0,314 % dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,004% sehingga capaian kinerjanya mencapai 0.318%

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	899	
		2. Jumlah peserta didik PAUD ((Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	29013	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18792	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2142	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2345	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2066	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	683	
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1169	
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	91535	
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	83344	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang	91535	

	menerima pembebasan biaya pendidikan		
12.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	48909	
13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	8650	
14.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4482	
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8572	
16.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3949	
17.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	8650	
18.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1056	
19.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	621	
20.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	710	
21.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5313	
22.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3485	
23.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	1215	
24.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	528	
25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	510	

		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	57	
1	Pendidikan	27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	23	
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6466	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6466	
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	6466	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	563	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	545	
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamay pendidikan dan pelatohan calon kepala sekolah	25	
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	46	
2	Kesehatan	35. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		36. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	37. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	150	Dinas Kesehatan
		38. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	90	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	39. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90	Dinas Kesehatan
		40. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	90	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	41. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	180	
		42. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	90	

	Kesehatan	43. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	270	
		44. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	120	
	Kesehatan	45. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	150	
		46. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	150	
	Kesehatan	47. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90	
		48. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150	
	Kesehatan	49. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90	
		50. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150	
	Kesehatan	51. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90	
		52. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	
	Kesehatan	53. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90	
		54. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150	
	Kesehatan	55. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90	
		56. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	60	
	Kesehatan	57. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	210	
		58. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	121	
	Kesehatan	59. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	120	
		60. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61. Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	33600 ha	
		62. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)	168000 m	

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten	23600 ha	
	64. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab	23670 m	
	65. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten	Tidak ada	
	66. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Tidak ada	
	67. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah	24324 m	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	79,16 %	
	69. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder kondisi baik	76,60 %	
	70. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	59 %	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71. Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada	
	72. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab (Ada/Tidak)	Ada/tidak	
	73. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	1 unit	
	74. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	
	75. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	125	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setemoat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	952 unit	
	77. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	
	78. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	
	79. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	35	

		80. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	35	
		81. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	
		82. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	
		83. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	
		84. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	
		85. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	0	
		86. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50 %	
		87. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	51,80 %	
		88. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	
		89. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	3,68 %	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	
		91. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab dalam tahun eksisting	652	
		92. Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	
		93. Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	
		94. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	7	
		95. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	
		96. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab	0	
		97. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten yang dipelihara/dirawat	0	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab	1.542.360 m	
		99. Panjang jalan yang dibangun	2.397 m	
		100. Panjang jembatan yang dibangun	24,8 m	

		101. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	13.360,79 m	
		102. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada jembatan yg diganti	
		103. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	8470,28 m	
		104. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tdk ada pemeliharaan	
		105. Panjang jalan yang dipelihara	102.560 m	
		106. Panjang jembatan yang dipelihara	201,91 m	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	
		108. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	338	
		109. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0	
		110. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	
		111. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab	Tidak ada	
		112. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	
		113. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	
		114. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	
		115. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	
		116. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh	Tidak ada	

	menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		
	117. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	
	118. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	
	119. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	
	120. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ada	
	121. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	
	122. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	
	123. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	
	124. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	50 rekom	
	125. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	208	
	126. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	
	127. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	
	128. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	50 rekom	

		129. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		130. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		131. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
4	Perumahan Rakyat	132. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	350651	
		133. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	255	
		134. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	255	
		135. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	237	
		136. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	18	
		137. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	
		138. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
		139. Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	255	
		140. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	
	Perumahan Rakyat	141. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		142. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	

		143. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		144. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		145. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		146. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	
	Perumahan Rakyat	147. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	35,39 ha	
		148. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	6.032 unit	
		149. Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	118,54	
	Perumahan Rakyat	150. Jumlah rumah Di Kab/Kota	350.651 unit	
		151. Jumlah unit PK RTLH	6.032 unit	
		152. Jumlah rumah tidak layak huni	67.541 unit	
		153. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	
		154. Rasio rumah dan KK	91,32 %	
		155. Jumlah rumah pembangunan baru	0	
	Perumahan Rakyat	156. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	51	
		157. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	2.850 unit	
		158. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	2.850 unit	
		159. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi ( <i>on site/ off site</i> )	2.850 unit	
		160. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	2.850 unit	
		161. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	2.850 unit	
		162. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	51	
		163. Jumlah pengembang yang terregistrasi	51	
		164. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	165. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	158	
		166. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	10.354	
		167. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Perda	

		168. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Tidak ada PPNS	
		169. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	
		170. Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	
	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	171. Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	
		172. Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	91.60%	
	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	173. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	
		174. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	
		175. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	0.02%	
		176. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0.02%	
		177. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	
		178. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%	
	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	179. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	
		180. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	
		181. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	
		182. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap bencana	100%	
	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	183. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	6 kali	

		184. Tersedianya pos sector damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak ada	
		185. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak ada	
		186. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	ada	
		187. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3 unit mobil damkar	
		188. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1 regu terdiri 6 orang	
		189. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	nihil	
		190. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	2	
6	Sosial	191. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6	
		192. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	127.767	
		193. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	
		194. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	250	
		195. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	
		196. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi	60	
		197. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	

	198. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	
	199. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	35	
	200. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	
	201. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	
	202. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	
	203. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	
	204. Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan relawan social yang disediakan	8	
	205. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	30	
	206. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	
	207. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	
	208. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	
	209. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	28	
	210. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	28	
	211. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	1	

	Sosial	212. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	100	
		213. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	33	
		214. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	
		215. Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan	0	
		216. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	
		217. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	ada	
7	Tenaga Kerja	218. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Renja	
		219. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	9.09%	
		220. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	24	
	Tenaga Kerja	221. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	2.5%	
		222. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	
		223. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	5.56%	
		224. Persentase LPK yang terakreditasi	0.33%	
		225. Persentase LPK yang memiliki perizinan	63.33%	
		226. Jumlah penganggur yang dilatih	173	
		227. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	
		228. Persentase penyerapan lulusan	18.13%	
		229. Lulusan bersertifikat kompetensi	0%	
		230. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0%	
		231. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0%	
	Tenaga Kerja	232. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0.02%	
		233. Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	
	Tenaga Kerja	234. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	49.41%	

		235. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	
		236. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	6	
		237. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur sakal upah	23	
		238. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	75.22%	
		239. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.18	
		240. Jumlah mogok kerja	nihil	
		241. Jumlah penutupan perusahaan	1	
		242. Jumlah perselisihan kepentingan	nihil	
		243. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 perusahaan	nihil	
		244. Jumlah perselisihan PHK	1	
		245. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	4	
		246. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	nihil	
		247. Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Tidak ada	
		248. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	10%	
	Tenaga Kerja	249. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	202	
		250. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	202	
		251. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	46	
		252. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	149	
		253. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	nihil	
		254. Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kab/kota	nihil	
		255. Jumlah pernjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	nihil	
		256. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar	118	

		Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER)		
		257. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	nihil	
		258. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	43	
		259. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	
		260. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0.23%	
		261. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	nihil	
		262. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	
8	Pembrdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	263. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	56	
		264. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	276	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	265. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	
		266. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	
		267. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	
		268. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	
		269. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Tidak ada	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	270. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan dan tinhhkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Tidak ada	
		271. Jumlah kader perempuan	Tidak ada	

		tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		
		272. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Tidak ada	
		273. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada	
		274. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	
		275. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	
		276. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	
9	Pangan	277. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	
		278. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
		279. tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	
		280. terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	
		281. tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
		282. tertanganinya kerawanan pangan	Ada	
		283. tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	
		284. terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	
10	Pertanahan	285. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	100%	
		286. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada	
	Pertanahan	287. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti	Tidak ada	

		Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		
	Pertanahan	288. Dokumen Izin membuka tanah	Tidak ada	
		289. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak ada	
11	Lingkungan Hidup	290. Hasil Perhitungan provinsi terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan hutan (ITH)	Capaian IKLH	
	Lingkungan Hidup	291. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Sumenep	
	Lingkungan Hidup	292. Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	
		293. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	
		294. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	0	
		295. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	
		296. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	106.67%	
		297. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	
12	Administrasi Kependudukan	298. Penerbitan akta perkawinan	781.91%	
		299. Penerbitan akta perceraian	100%	
		300. Penerbitan akta kematian	100%	
		301. Penyajian data kependudukan	100%	
13	Pemberdayaan masyarakat	302. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	21 desa	
		303. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	21 desa	

		304. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	601 lembaga	
		305. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	349 lembaga	
	Pemberdayaan masyarakat	306. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	21 desa	
		307. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	8	
		308. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	601 lembaga	
		309. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	349 lembaga	
14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	310. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada
	311. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		3607	
	312. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		14.59 per 1000	
	313. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)		27.36 %	
	314. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan & mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		31 lembaga	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	315. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	8.58%	
		316. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8.58%	
		317. Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Ada Pokja KKBPK	
		318. Persentase pelayanan KB	72.06%	

		Pasca Persalinan		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	319. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	37.44%	
		320. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Tidak tersedia	
15	Perhubungan	321. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	72.73%	
		322. Terlaksananya pelayanan uji berkala	100.61%	
		323. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	
		324. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	100%	
16	Komunikasi dan Informatika	325. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	
		326. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	
		327. Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	
	Komunikasi dan Informatika	328. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	1.75%	
		329. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	29.85%	
		330. Persentase perangkat daerah	100%	

		yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
		331. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	
		332. Presentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10%	
		333. Presentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	
		334. Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	100%	
		335. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	
		336. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	
		337. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	
		338. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	
		339. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	41.79%	
		340. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	20%	
		341. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	Ada	
	Komunikasi dan Informatika	342. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100%	
		343. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan	100%	

		pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		
		344. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	345. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak ada	
		346. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	
		347. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	5.14%	
		348. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.47%	
		349. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8.94%	
		350. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.38%	
		351. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.24%	
		352. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak ada	

		353. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10.90%	
		354. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak ada	
		355. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		
		356. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.14%	
		357. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.80%	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	358. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2.56%	
		359. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system <i>only data system</i>	Tidak ada	
		360. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.24%	
		361. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		
		362. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		
		363. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		
		364. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.02%	
18	Penanaman Modal	365. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	
		366. Standar operasional prosedur pelakasnaan pemberian fasilitas intensi penanaman modal	Tidak Ada	

		367. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tidak Ada	
		368. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4 Kegiatan	
		369. Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada	
		370. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	
		371. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	80 orang	
		372. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	14.893	
		373. Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 1.618.863.761.967,-	
		374. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	32 orang	
		375. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	41	
		376. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	4	
19	Kepemudaan dan Olahraga	377. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	3900	
		378. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	3900	
	Kepemudaan dan Olahraga	379. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	116	
		380. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	11	
	Kepemudaan dan Olahraga	381. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	646	
		382. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	
20	Statistika	383. Tersedianya buku profil daerah	Ada	
		384. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0%	
		385. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0%	
		386. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0%	
		387. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0%	
		388. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0%	

		389. Persentase kelengkapan metadata variable dari kegiatan statistik	0%	
21	Persandian	390. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	
		391. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau apikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0%	
		392. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	
		393. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0%	
22	Kebudayaan	394. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	251	
		395. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	7	
		396. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	7	
		397. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	61	
		398. Register cagar Obudaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	251	
		399. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	7	

		400. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dngan dukungan data	255	
		401. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	7	
		402. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	7	
		403. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	7	
		404. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	82201	
		405. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	200	
		406. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	7	
		407. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	ada	
		408. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Ada 6 sertifikasi	
		409. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	
		410. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	0	
		411. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya & pemuseuman	0	
		412. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	
		413. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2 keg	
23	Perpustakaan	414. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	7.40%	
		415. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1.17%	
		416. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dg penduduk	0%	
		417. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%	
		418. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2658	
	Perpustakaan	419. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi /dialih media	6	

		(digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		
		420. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	5	
		421. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	5	
24	Kearsipan	422. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	
		423. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	
		424. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	
		425. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	
	Kearsipan	426. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Nihil	
		427. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana NSPK	nihil	
		428. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	nihil	
		429. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Nihil	
		430. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Nihil	
		431. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Nihil	
		432. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10.965 RTP	
25	Kelautan dan perikanan	433. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	
		434. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	11 IUP	

		435. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	49 Kelompok penerima bantuan budidaya & 250 Orang pelatihan budidaya.	
		436. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	5.000 benih	
26	Pariwisata	437. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	28	
		438. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	261	
		439. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	102	
		440. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	58	
		441. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	11	
		442. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	
		443. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	
		444. Persentase tenaga kerja di sector pariwisata yang disertifikasi	9.36%	
		445. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	66.67%	
		446. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	49	
27	Pertanian	447. Jumlah sarana pertanian yang diberikan	122	
		448. Prasarana pertanian yang digunakan	84	
		449. Penerbitan izin usaha pertanian	4	
		450. Persentase prasarana yang digunakan	100%	
		451. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100%	
		452. Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100%	
28	Kehutanan	453. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak Ada	
		454. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada	
		455. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak Ada	
		456. Menurunnya gangguan	Tidak Ada	

		kawasan TAHURA		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	457. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Tidak Ada	
30	Perdagangan	458. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a) Pusat perbelanjaan b) Toko swalayan	100%	
		459. Persentase penerbitan TDG	100%	
		460. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	
		461. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	29 a) 100% b) Nihil c) nihil	
		462. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	Nihil	
		463. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Nihil	
		464. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	80%	
		465. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Nihil	
	perdagangan	466. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0.001	
	perdagangan	467. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	67.30%	
		468. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	
31	Perindustrian	469. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	nihil	
	Perindustrian	470. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	nihil	

	Perindustrian	471. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	
		472. Persentase jumlah izin perluasan industry (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	nihil	
	Perindustrian	473. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan inndustri di kab/kota	15.32%	
31	Transmigrasi	474. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	nihil	
		475. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	nihil	
		476. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	nihil	
<b>2.2.2.</b>				

## 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 taun yang berpartisipasi dalam PAUD	90.91%	
		2. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.03%	
		3. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah utama	100%	
		4. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85.63%	
2	Kesehatan	5. Rasio daya tamping RS terhadap jumlah Penduduk	0.04%	
		6. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100%	
		7. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90.79%	
		8. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94.06%	
		9. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
		10. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
		11. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52.61%	
		12. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65.98%	
		13. Persentase warga Negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	9.34%	
		14. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		15. Persentase penderita DM yng mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		16. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
		17. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	

		18. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab.	14.48%	
		20. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab.	25.01%	
		21. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab. yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	
		22. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	81.15%	
		23. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81.15%	
		24. Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100%	
		25. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	68.48	
		26. Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	
		27. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	
4.	Perumahan Rakyat	28. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100%	
		29. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Nihil	
		30. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	29.85%	
		31. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	19.26%	
		32. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100%	
5.	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan	33. Persentase gangguan rantibum yang dapat diselesaikan	100%	
		34. Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	100%	

	Masyarakat	35. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10.42.510	
		36. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.138.168	
		37. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	275	
		38. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	
		39. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	
6.	Sosial	40. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	
		41. Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	100%	
7.	Tenaga Kerja	42. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	90.91%	
		43. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	0.19%	
		44. Tingkat produktivitas tenaga kerja	3.81%	
		45. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	83.72%	
		46. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) mealui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	58.42%	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	6.30%	
		48. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.01%	
		49. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0%	
9	Pangan	50. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	250.19%	
10	Pertanahan	51. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan	100%	

		peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		
		52. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Nihil	
		53. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	
		54. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	Nihil	
		55. Tersedianya tanah untuk masyarakat	Nihil	
		56. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	
11	Lingkungan Hidup	57. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	74.77	
		58. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab	9.17%	
		59. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	12%	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60. Perakaman KTP elektronik	89.17%	
		61. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	25.27%	
		62. Kepemilikan akta kelahiran	92.15%	
		63. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	17.54%	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64. Persentase pengentasan desa tertinggal	282%	
		65. Persentase peningkatan status desa mandiri	0%	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66. TFR (Angka Kelahiran Total)	1225	
		67. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	8.58%	
15	Perhubungan	68. Rasio konektivitas kabupaten	8.84%	
		69. Kinerja lalu lintas kabupaten	97.31	
16	Komunikasi dan Informatika	70. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0.2	
		71. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	

		72. Persentase masyarakat yang menjadi saran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	100%	
17	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	73. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	91.60%	
		74. Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	22.54%	
18	Penanaman Modal	75. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	0.24%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	76. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.90%	
		77. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3.18%	
		78. Peningkatan prestasi olahraga	3.09%	
20	Statistik	79. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	9	
		80. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	
21	Persandian	81. Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	
22	Kebudayaan	82. Terlestarikannya Cagar Budaya	3.066,67%	
23	Perpustakaan	83. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.79%	
		84. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	
24	Kearsipan	85. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0	
		86. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsi sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	75%	
25	Kelautan dan Perikanan	87. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data:one data KKP)	Nihil	
26	Pariwisata	88. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	48.900,88 ton	

		89. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-96.40%	
		90. Tingkat hunian akomodasi	-86.10%	
		91. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	100%	
		92. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0.39%	
27	Pertanian	93. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0.07%	
		94. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	390.93%	
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	95. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	-3.02%	
29	Perdagangan	96. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Nihil	
		97. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	
		98. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	57.14%	
30	Perindustrian	99. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	67.30%	
		100. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dala, RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1.87%	
		101. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nihil	
		102. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	
		103. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Nihil	
		104. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia	

#### 2.2.4. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	Perencanaan dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11.77%	
		2. Rasio PAD	10.60%	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	35.22%	
		6. Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan th 2019 wtp	
2	Pengadaan	7. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	31.56%	
		8. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	9.73%	
		9. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22.75%	
3	Kepegawaian	10. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98.43%	
		11. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.05%	
		12. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	38.39%	
4	Manajemen Keuangan	13. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-13.54%	
		14. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9.40%	

		15. Manajemen aset	Ada	
		16. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	19.76%	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	17. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	91.98%	
		18. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Keberhasilan atau kegagalan menjalankan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur dan dapat diukur. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai dan predikat sebagai berikut :

No	Nilai Angka	Predikat
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d <95	Berhasil
3.	50 s/d < 80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 50	Kurang Berhasil

## A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Adapun target kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1  
Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>				
1.1.1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1.1.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,83 tahun	
		1.1.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,75 tahun	
1.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,32 tahun	IKU
1.1.3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1.1.3.1. Angka Kemiskinan	19,34%	
		1.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	1,9 %	
		1.1.3.3. Penurunan Masalah Sosial	0,5 %	IKU
<b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur</b>				
2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2.1.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	64,67 %	IKU
		2.1.1.2. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	86,93 %	
		2.1.1.3. Indeks Kinerja Irigasi	73 %	IKU
		2.1.1.4. Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :		IKU
	a. Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	315.866 Orang		
	b. Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	30 Menit		
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.2.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	
		2.1.2.2. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	95%	
		2.1.2.3. Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	5%	
		2.1.2.4. Rasio elektrifikasi	62,47	
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>				
2.2.1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	70.00	
		2.2.1.2. Indeks kualitas udara	79,17	
		2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	75.58	
<b>Tingkat Pertumbuhan Ekonomi</b>				
3.1.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	3.1.1.1. Nilai Tukar Petani	107,5 skor	IKU
		3.1.1.2. Jumlah PDRB Sektor Pertanian	10,91 Trilyun	
		3.1.1.3. Nilai Tukar Nelayan	109,2 skor	IKU
3.1.2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	3.1.2.1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura :		
		- Padi	237.525,12 ton	
		- Jagung	450.684,29 ton	
		- Kedelai	7.891, 60 ton	
		- ubi Kayu	107.029,60 ton	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		3.1.2.2. Produksi Hasil Perkebunan :		
		- Kelapa	42,663,92 ton	
		- Tembakau	9.242,28 ton	
		- Cabe Jamu	9,868.15 ton	
		- Jambu Menté	4,822,31 ton	
		- siwalan	776,37 ton	
		3.1.2.3. Produksi Hasil Peternakan :		
		- Daging (ton)	4.564.189 ton	
		- Telur (ton)	2.887.782 ton	
		3.1.2.4. Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton)	715,675 ton	
		- Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	666,693 ton	
3.1.3.	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	3.1.3.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,5	
3.1.4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	3.1.4.1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	20 %	IKU
		3.1.4.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	13,84 ton	IKU
		3.1.4.3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	6,66 %	IKU
3.1.5.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	3.1.5.1. Persentase Koperasi Sehat	3 %	
		3.1.5.2. Persentase Pertumbuhan UMKM	20 %	IKU
3.1.6.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	3.1.6.1. Persentase Kunjungan Wisatawan	90 %	
		3.1.6.2. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	15 %	
3.1.7.	Meningkatnya Daya Tarik Investor	3.1.7.1. Jumlah Investor	6.827 orang	
		3.1.7.2. Jumlah Nilai Investor	465.381.741.065	
3.1.8.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	3.1.8.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,18 %	
<b>Nilai SKM</b>				
4.1.1.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	4.1.1.1. Nilai SAKIP	BB	
		4.1.1.2. Opini BPK	WTP	
		4.1.1.3. Peringkat LPPD	10	
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	4.1.2.1. Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik		IKU
		- Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	95	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	80	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	93	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	80	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	78	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	86	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	86	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	84	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	81	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	87	
		4.1.2.2. E-Government		
		- Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	31 unit	
		- Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan	31 unit	
<b>Indek Desa Membangun</b>				
5.1.1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	5.1.1.1. Persentase BUMDes Yang Sehat	54 %	
		5.1.1.2. Persentase Desa Mandiri	0 %	
		5.1.1.3. Persentase Desa Tertinggal	35,75%	
		5.1.1.4. Desa Berkembang (Desa Madya)	189 Desa	
		5.1.1.5. Desa Tertinggal (Desa Pramadya)	119 Desa	
		5.1.1.6. Desa Sangat Tertinggal	10 Desa	
<b>Indek Keamanan</b>				
5.2.1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.2.1.1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	100 %	
5.2.2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	5.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	
		5.2.2.2. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	1.008,90 Skor	
<b>Indeks Toleransi</b>				
6.1.1.	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	6.1.1.1. Persentase Penyelesaian konflik sosial	100%	
6.1.2.	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	6.1.2.1. Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	80 %	

Dari 21 sasaran strategis RPJMD yang diperjanjikan pada tahun 2020 di atas ditetapkan sebanyak 7 sasaran dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU dipertimbangkan atas dasar tema pembangunan tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis Potensi dan Produk Unggulan Daerah melalui Pembangunan**

**Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan".** Adapun Sasaran/IKU tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Atas Dasar Tema Pembangunan**  
**Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,32	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Penurunan Masalah Sosial	%	0,5	Dinas Sosial
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,67	Dinas PU Bina Marga
		Indeks Kinerja Irigasi	%	73	Dinas PU Bina Marga
		Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan			
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	315866	Dinas Perhubungan
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	30	Dinas Perhubungan
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Skor	107,5	Dinas Pertanian
		Nilai Tukar Nelayan	Skor	109,2	Dinas Perikanan
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,15	Dinas Perindag
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Ton	13,84	Dinas Perindag
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	6,66	Dinas Perindag
6	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20	Dinas Koperasi
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	IKM Unit-unit Layanan Publik			Unit-unit Layanan Publik
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks	3	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	Nilai	95	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	Nilai	80	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	Nilai	93	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	Nilai	80	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	Nilai	78	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	Nilai	86	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan	Nilai	86	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Diklat			
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	Nilai	84	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	Nilai	81	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	Nilai	87	

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dari 21 sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas dilakukan pengukuran realisasi IKU serta Indikator kinerja sasaran lainnya baik realisasi tahun pelaksanaan maupun capaian terhadap target serta analisisnya. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

### REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.3.3  
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,32	71,41	<b>100,13%</b>	Dinas Kesehatan	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Penurunan Masalah Sosial	%	0,5	0,50	<b>100%</b>	Dinas Sosial	
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,67	65,85	<b>102%</b>	Dinas PU Bina Marga	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	73	94,35	<b>129,25%</b>	Dinas PU Bina Marga	
		Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan						Dinas Perhubungan
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	315.866	186.233	<b>58,96%</b>		
	Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	30	35	<b>116,67%</b>			
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Skor	107,5	102,53	<b>95,38%</b>	Dinas Pertanian	
		Nilai Tukar Nelayan	Skor	109,2	belum rilis	-	Dinas Perikanan	
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,15	0,13	<b>86,67%</b>	Dinas Perindag	

	dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Ton	13,84	belum rilis	-	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	6,66	belum rilis	-	
6	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20	7,50	<b>37,50%</b>	Dinas Koperasi
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	IKM Unit-unit Layanan Publik					Unit-unit Layanan Publik
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indelk	3	3,25	<b>108,33%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	Nilai	95	83,06	<b>87,43%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	Nilai	80	89,26	<b>111,58%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	Nilai	93	91	<b>97,85%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	Nilai	80	82,17	<b>102,71%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	Nilai	78	78,92	<b>101,18%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	Nilai	86	88,15	<b>102,50%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	Nilai	86	88,15	<b>102,50%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	Nilai	84	85,60	<b>101,90%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	Nilai	81	78,27	<b>96,63%</b>	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	Nilai	87	92,29	<b>106,08%</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU tahun 2020 sebesar 103,39%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2020 dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

#### Realisasi Kinerja Persasaran

##### 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan” dengan dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup menghasilkan capaian rata-

reta kinerja sebesar **90%** dengan predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.4  
Realisasi Sasaran 1 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,83	5,71	84%
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,75	13,20	96%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>90%</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 terealisasi 5,71 tahun dari target 6,83 tahun, sehingga capaian angka rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 84%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,25 Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu yaitu sejumlah 5,46. Capaian angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2014 cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sumenep semakin baik.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2020 sebesar 13,20 tahun dari target 13,75 tahun, angka ini sehingga capaian sebesar 99,40%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 13,07 tahun. Angka capaian tahun 2018 dan 2019 tetap sama sebesar 99%.

## 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2020 mencapai 100% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”**. Adapun capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.5  
Realisasi Sasaran 2 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,32	71,41	100%
Rata-Rata Capaian				100%	

Usia Harapan hidup di Kabupaten Sumenep dilihat dari realisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, angka harapan hidup terus mengalami peningkatan. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar **100%**, capaian yang diraih ini sesuai dengan target yang dicanangkan yaitu 71,32 tahun dan realisasinya menyentuh angka 71,41 Tahun.

Meningkatnya kesehatan masyarakat pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI pada tahun 2020 mencapai 65,44 per 100.000 KH, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 72,12 per 100.000 KH. Akan tetapi capaian kinerja untuk Angka kematian Ibu (AKI) di tahun 2020 ini masih ada di angka 72%. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 1,89 per 1.000 KH yang sebelumnya 2,03 per 1.000 KH. Capaian kinerja Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 mencapai 222%.

### 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akses Kesejahteraan Masyarakat” dengan 3 (tiga) indikator yaitu Angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka dan Penurunan Masalah Sosial. Capaian Kinerja sasaran 3 termasuk predikat “**Cukup Berhasil**”. Hal ini dipengaruhi 2 indikator yaitu Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang jauh dari target kinerja. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.6  
Realisasi Sasaran 3 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	19,34	20,18	104%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,9	2,84	149%
		Penurunan Masalah Sosial	0,5	0,5	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>118%</b>	

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Kemiskinan

Realisasi Angka Kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 20,18% sedangkan target yang dicanangkan 19,34%. Secara prosentase capaian kinerja pada indikator ini mencapai 104%, akan tetapi angka ini tidak menunjukkan hal yang bagus karena jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 211,98 Ribu, angka ini mengalami lonjakan menjadi 220,23 ribu pada tahun 2020.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dari jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja. Adapun realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 mencapai 2,84 dari target kinerja 1,9. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 149%.

c. Penurunan Masalah Sosial

Realisasi Penurunan Masalah Sosial pada tahun 2020 sebesar 0,5% dari target 0,5% tahun, sehingga capaian Penurunan Masalah Sosial 100%.

**4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur**

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dengan 5 (Lima) indikator kinerja mencapai **97%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” dengan catatan ada satu indikator yaitu kapasitas layanan angkutan kepulauan berpredikat “cukup berhasil”. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.7  
Realisasi Sasaran 4 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	64,67 %	65,85%	102%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	86,93 %	94,35%	109%	
		Indeks Kinerja Irigasi	73 %	71,50%	98%	
		Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :				
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	315.866	186.233	59%	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	30	35	3	
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>97%</b>			

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2020 terealisasi 65,85% dari target 64,67%, sehingga capaiannya 102%. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan sehingga dalam perhitungannya Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dibagi menjadi 2, yaitu untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.

Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 73,74% sedangkan realisasinya adalah 73,74% dan Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan memiliki target 55,61% sedangkan realisasinya 57,96% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

b. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Proporsi Jumlah Jembatan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2020 terealisasi 94,35% dari target 86,93%, sehingga capaiannya 109%. Senada dengan Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik dalam perhitungannya juga dibagi menjadi 2, yaitu untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.

Untuk indikator kedua yaitu Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 89,66% sedangkan realisasinya 97,69% dan untuk Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan targetnya adalah 84,21% dan realisasinya 91,00% hal ini juga menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan indikator ini termasuk **Sangat Berhasil**.

c. Indeks Kinerja Irigasi

Indeks Kinerja Irigasi baru dilakukan pengukuran pada tahun 2019 dengan realisasi 71,50% dari target 73% sehingga indikator ini di kategorikan **Sangat Berhasil**. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 12/PRT/M/2015 tentang exploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penentuan indeks kinerja sistem irigasi sebagai berikut :

80 – 100 : kinerja sangat baik

70 – 79 : kinerja baik

55 – 69 : kinerja kurang dan perlu perhatian

< 55 : kinerja jelek dan perlu segera penanganan

Dapat disimpulkan bahwa indeks kinerja irigasi dikabupaten sumenep termasuk Kategori **Kinerja Baik**.

d. Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan

Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan tahun terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan dan Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan

Kapasitas layanan angkutan kepulauan merupakan jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut menuju daerah kepulauan. Kapasitas layanan angkutan kepulauan yang terlayani selama tahun 2020 adalah 186.233 orang. Sedangkan target pada tahun 2020 sebesar 315.866 Orang sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 59% dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**.

2) Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan

Headway rata-rata angkutan pedesaan merupakan rata-rata interval waktu antara angkutan satu dengan angkutan lain yang diukur pada suatu periode waktu pada satu titik/lokasi tertentu. Semakin rendah angka Headway rata-rata maka semakin efisien. Headway rata-rata angkutan pedesaan pada tahun 2020 sebesar 35 menit dimana targetnya sebesar 30 menit sehingga didapat tingkat capaian sebesar 117% dapat dikategorikan kurang efisien.

#### 5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pemukiman/perumahan secara memadai” dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai **58,66%** dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.8  
Realisasi Sasaran 5 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	81,15%	81%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	95%	81,15%	92.98%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	5%	0,10%	2%
		Rasio elektrifikasi	62.47	78,95%	126%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>58,66%</b>		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 100% namun masih belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 84,62%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,87%.

dengan dukungan melalui kegiatan Pembangunan Sanitasi dan Pembangunan Sanitasi (DAK), hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang

telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

- b. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih  
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 95%, dengan hasil realisasi sebesar 81,15%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,6%, hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif kurang baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Akan tetapi predikat realisasi untuk tahun 2020 memperoleh predikat berhasil.
- c. Persentase Penurunan Luas Area Kumuh  
Persentase Penurunan Luas Area Kumuh ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 0,10% sehingga capaian yang diperoleh indikator ini pada tahun 2020 sebesar 2%, hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.
- d. Rasio Elektrifikasi  
Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 62,47% dan terealisasi sebesar 78,95%, sehingga capaian yang diperoleh indikator ini pada tahun 2020 sebesar 126%, hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

## 6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai **98,57%** dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.9  
Realisasi Sasaran 6 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai	70.00	60.00	85.71%
		Indeks kualitas udara	79.17	88.76	112%
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	75.58	74.27	98%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>98,57%</b>	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks kualitas Air Sungai

Indeks Kualitas Air tahun 2020 adalah 60.00, nilai ini masih di bawah dari target yang ditetapkan yaitu 70,00, sehingga pencapaian kinerja sebesar 85,71 %.

Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

b. Indeks kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 adalah 88,76 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan 79,17 dengan capaian pencapaian kinerja sebesar 112%. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

c. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan Tahun 2020 adalah 74,27 masih kurang dari target kinerja yang ditetapkan 75,58 dengan capaian kinerja sebesar 98%. Kegagalan tercapainya target kinerja sasaran disebabkan oleh tidak tercapainya target kinerja Program Penataan TPA Sedangkan tidak tercapainya kinerja program tersebut disebabkan dengan tidak tercapainya target kinerja Kegiatan Pengelolaan TPA. Kegiatan Pengelolaan TPA, mempedomani surat hasil kajian dari KLHK tentang Amdal Pengelolaan Limbah B3

(Incinerator) bahwa adanya ketidaksesuaian tata ruang dengan lokasi rencana yang akan dipergunakan Pengelolaan Limbah B3, maka rincian kegiatan Jasa Konsultasi Penyusunan Amdal dan Pengadaan Alat Incinerator batal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

## 7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, untuk indikator Nilai Tukar Nelayan masih belum ada nilai pencapaiannya karena masih ada beberapa data yang belum rilis dari BPS sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat dihitung. Untuk indikator yang dapat dilihat hasil pencapaiannya yaitu Indikator Nilai Tukar Petani dengan nilai capaian 95% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.10  
Realisasi Sasaran 7 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	107,5 skor	102,53	95%
		Nilai Tukar Nelayan	109,2 skor	BPS blm rilis	BPS Blm Rilis
<b>Rata-Rata Capaian</b>					

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

### a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan Indikator sistem dari kesejahteraan petani. NTP diukur berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani. Hasil ukur NTP dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani

mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. c.  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Sumenep menunjukkan skor 102,53 yang artinya mengalami surplus. Skor yang didapatkan pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan 1,13 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh skor 101,4.

b. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100.  $NTN > 100$ , harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

Untuk Dinas Perikanan Kabupaten sumenep belum dapat menghitung Nilai Tukar Nelayan karena data harga yang dibayarkan oleh nelayan masih belum rilis. Data yang hanya bisa dihitung oleh Dinas Perikanan adalah Jumlah Pendapatan Nelayan Perkapita dengan realisasi sebesar 36.581.582 dari yang ditargetkan sebesar 28.753.583 dengan capaian sebesar 127,22%

## 8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” dengan 4 (Empat) indikator kinerja mencapai **111,94%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.11  
Realisasi Sasaran 8 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura :			
		Padi	237.525.12 ton	254.323,35	107%
		Jagung	450.684,29 ton	361.737,66	80,26%
		Kedelai	7.891,95 ton	347,14	4,40%
		ubi Kayu	107.029,6 ton	41.889,50	39,14%
		Produksi Hasil Perkebunan :			
		Kelapa	42.663,92 ton	44.180,09	103,55%
		Tembakau	9.242,31 ton	5.901,59	63,85%
		Cabe Jamu	9.868,15 ton	10.299,68	104,37%
		Jambu Mente	4.822,31 ton	5.380,86	111,58%
		siwalan	776,37 ton	750,57	96,68%
		Produksi Hasil Peternakan :			
		Daging (ton)	4.564,189 ton	5.253,502	115,10%
		Telur (ton)	2.887,782 ton	4.231,8	146,54%
		Produksi Hasil Perikanan :			
		Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton)	49.000 ton	42.795	87,34%
Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	1.544 ton	6.105,77	395,45%		
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>111,94%</b>		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Produksi tanaman pangan dan hortikultura

Capaian kinerja untuk produksi padi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 237.525.12 ton dan dicapai 254.323,35 Ton (107%), jumlah produksi komoditas Padi ini melebihi target yang dicanangkan.

Jagung ditargetkan sebesar 450.684,29 ton dicapai 361.737,66 ton (80,26%).

Pada tahun 2020 produksi Kedelai mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 347,14 Ton dari Target sebesar 7.891,95 ton yang mengakibatkan capaian kinerja hanya berjumlah 4,40%. Penurunan ini disebabkan oleh semakin menurunnya luas panen dan menurunnya minat petani terhadap komoditi kedelai. Hal ini

dipengaruhi oleh harga jual yang rendah (Rp. 5000,-) sedangkan batas minimal harga jual kedelai/kg adalah Rp 7000,-.

Untuk komoditas Ubi Kayu ditargetkan sebesar 107.029,6 ton dan realisasinya hanya mencapai 41.889,50 ton (39,14%) .

b. Produksi Hasil Perkebunan

Capaian kinerja Produksi Hasil Perkebunan pada tahun 2020 untuk produksi Kelapa ditargetkan sebesar 42.663,92 ton dan dicapai 44.180,09 ton (103,55%), Tembakau ditargetkan sebesar 9.242,31 ton dicapai 5.901,59 ton (63,85%), Cabe Jamu ditargetkan sebesar 9.868,15 ton dicapai 10.299,68 ton (104,37%) , Jambu Mete ditargetkan sebesar 4.822,31 ton dicapai 5.380,86 ton (111,58%) dan Siwalan ditargetkan sebesar 776,37 ton dicapai sebesar 750,57 ton (96,68%).

Pada Tanaman Perkebunan ini , produksi Tembakau dan Siwalan tidak mencapai target dikarenakan kemarau panjang yang mengakibatkan produktivitas tanaman rendah sehingga akibatnya jumlah produksi juga tidak sesuai yang ditargetkan.

c. Produksi Hasil Peternakan

Produksi Hasil Peternakan terdiri dari produksi daging dan produksi telur. Produksi ternak yaitu daging di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 4.564.189 kg produksi daging terealisasi sebesar 5.253.502 kg produksi daging dengan capaian realisasi kinerja 115,10 %. Produksi telur di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 2.887.782 kg produksi telur dengan realisasi sebesar 4.231.800 kg produksi telur dengan capaian realisasi kinerja 146,54 %

d. Produksi Hasil Perikanan :

Produksi Hasil Perikanan terdiri Hasil Perikanan Tangkap dan Hasil Perikanan Budidaya. Adapun pencapaian kinerja indikator hasil perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 42.795 ton dari target indicator kinerja sebesar 49.000 ton dengan persentase capaian sebesar 87,34% sedangkan realisasi capaian kinerja jumlah hasil produksi budidaya tahun 2020 sebesar 6.105,77 ton dari target kinerja sebesar 1.544 ton atau mencapai 395,45%.

## 9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 124,90% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.12  
Realisasi Sasaran 9 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,5	96,5	123%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>124,90%</b>	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

### Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Untuk mengetahui perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Sumenep yang dapat dilihat dari nilai target Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 78,5. Sumber data untuk penghitungan PPH dengan menggunakan data Susenas yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep. Pada penghitungan PPH 2020, terdapat perubahan pada data Susenas dibandingkan tahun sebelumnya, dimana komoditas bahan pangan yang menjadi sasaran survei bertambah.

Dari hasil perhitungan data Susenas, diperoleh skor PPH di tingkat konsumsi adalah 96,5 atau sekitar 121,38% dari skor PPH yang ditargetkan. Dari hasil tersebut, dapat dianalisa secara umum bahwa terdapat peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat terutama pada kelompok pangan sayur dan buah. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak dari program optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang banyak dialokasikan baik dari sumber dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

## 10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 54,66% dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.13  
Realisasi Sasaran 10 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0,15%	0,13%	87%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	13,84 %	-7,56	54,62%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	6,66%	-1,49	22,37%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>54,66%</b>	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah  
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 ditargetkan 0,15% dengan realisasi 0,13% sehingga capaian kinerja 87% dengan Predikat “**Berhasil**”.
- b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan  
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2020 terealisasi -7,56% dari yang ditargetkan 13,84% dengan capaian kinerja 54,66% dengan Predikat “**Cukup Berhasil**”.
- c. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian  
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian tahun 2020 terealisasi -1,49% dari yang ditargetkan 6,66% dengan capaian kinerja 22,37% dengan Predikat **Kurang Berhasil**”.

## 11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 93,75% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.14  
Realisasi Sasaran 11 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	3%	4,5%	150%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	20%	7,50%	37,50%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>93,75%</b>	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Koperasi Sehat

Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2020 sebanyak 72 koperasi atau 4,5% dari jumlah Koperasi yang ada di kabupaten Sumenep sebanyak 1.609. Capaian Kinerja Persentase Koperasi Sehat sebesar 150% dengan predikat "**Sangat Berhasil**". Koperasi Sehat meningkat dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan Koperasi dalam mengelola Koperasi khususnya.

b. Persentase Pertumbuhan UKM

Persentase Pertumbuhan UKM tahun 2020 terealisasi 7,50% dari yang ditargetkan 20% dengan capaian kinerja 37,50% dengan Predikat "**Kurang Berhasil**".

## 12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata" dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 27,5% dan termasuk predikat "**Kurang Berhasil**" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.15  
Realisasi Sasaran 12 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	90%	49,65%	55%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	15%	0,066%	0,44%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>27,5%</b>	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Kunjungan Wisatawan

Persentase Kunjungan Wisatawan tahun 2020 terealisasi sebesar 49,65% dari target sebesar 90%, capaian Kinerja 55% dengan predikat “**Cukup Berhasil**”. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan baik dari Nusantara maupun mancanegara berjumlah 807.869 Orang, hamper setengah dari target yang dicanangkan yaitu 1.627.000 wisatawan.

b. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Pada tahun 2020 Realisasi persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 0,066% dari target 15% dengan capaian 0,44% predikat “**Kurang Berhasil**”, diperoleh dari target sektor pariwisata Rp. 177.720.050- dibagi target pendapatan Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 263.257.990.470,67-.

### 13. Meningkatnya Daya Tarik Investor

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Tarik Investor” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 251,5% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.16  
Realisasi Sasaran 13 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	6.827 orang	5.754 orang	84%
		Jumlah Nilai Investor	465.381.741.065	1.948.131.251.836	419%
Rata-Rata Capaian			251,5%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Jumlah Investor

Jumlah Investor tahun 2020 terealisasi sebesar 5.754 orang dari target sebesar 6.827 dengan capaian Kinerja 84% dengan predikat **“Berhasil”**.

b. Jumlah Nilai Investor

Pada tahun 2020 Realisasi Jumlah Nilai Investor sebesar 1.948.131.251.836 dari target 465.381.741.065 dengan capaian 419% predikat **“Sangat Berhasil”**.

**14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 89,75% dan termasuk predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.17  
Realisasi Sasaran 14 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAAN KINERJA
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,18%	11,50%	103%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar 11,50% dari target sebesar 11,18%, capaian Kinerja 103% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

**15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah” terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang masih belum diketahui capaiannya yaitu Indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, dan Peringkat LPPD. Peringkat LPPD masih menunggu dari Kemendagri. Untuk Opini BPK masih menunggu proses audit dari BPK. Sedangkan untuk Nilai SAKIP tahun 2020 masih belum

dirilis. Oleh karena itu dari ketiga indikator kinerja tersebut belum bisa disematkan predikat. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.18

## Realisasi Sasaran 15 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	BB	Belum Rilis	-
		Opini BPK	WTP	Proses Audit BPK	-
		Peringkat LPPD	10	Belum rilis	-
<b>Rata-Rata Capaian</b>					

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

## a. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kabupaten Sumenep tahun 2020 masih belum dirilis.

## b. Opini BPK

Opini BPK Tahun 2020 masih belum dirilis dari BPK karena saat ini Kabupaten Sumenep masih proses Audit BPK.

## c. Peringkat LPPD

Peringkat LPPD pada tahun 2020 masih belum rilis dari Kemendagri.

## 16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 119,38% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.19

## Realisasi Sasaran 16 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik			101%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	3,25	108%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	95	83,06	87%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	80	89,26	112%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	93	91	98%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	80	82,17	103%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	78	78,92	101%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	86	88,15	103%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	86	88,15	103%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	84	85,60	102%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	81	78,27	97%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	87	92,29	106%
		E-Government			
		Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	31 unit	67	216%
		Jumlah OPD Yang Telah Terintegrasi E-Government nya secara keseluruhan	31 unit	67	216%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>119,38%</b>		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik

Target Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik tahun 2020 sebesar 95,8 dengan realisasi 94,56 dengan capaian indikator 101%. Nilai SKM 94,56 menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

b. E-government

Jumlah OPD yang telah menyelenggarakan E-government dikabupaten Sumenep berjumlah 67 OPD dari yang ditargetkan sejumlah 31 OPD dengan capaian sebesar 216% predikat "**Sangat Berhasil**". Jumlah OPD yang telah terintegrasi E-Government nya secara keseluruhan dikabupaten Sumenep 67 OPD dari yang ditargetkan sejumlah 31 OPD dengan capaian sebesar 216% predikat "**Sangat Berhasil**".

## 17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial” dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 84,33% dan termasuk predikat “ **Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.20  
Realisasi Sasaran 17 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	54%	28,52%	53%
		Persentase Desa Mandiri	0%	0%	100%
		Persentase Desa Tertinggal	35,75%	35,75%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>84,33%</b>

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

### a. Persentase BUMDes Yang Sehat

Capaian kinerja Persentase BUMDes Yang Sehat Tahun 2020 sebesar 53% dengan predikat “**Cukup Berhasil**”. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 28,52% dari target 54%. Jumlah

### b. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri tahun 2020 ditargetkan 0% dengan realisasi 0% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan Predikat “**Sangat Berhasil**”.

### c. Persentase Desa Tertinggal

Persentase Desa Tertinggal ditargetkan sebesar 35,75% dan terealisasi sebesar 35,75% dengan capaian sebesar 100% predikat “**Sangat Berhasil**”. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 terdapat 100 desa, sedangkan untuk tahun 2020 tidak ada desa tertinggal.

### 18. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.21  
Realisasi Sasaran 18 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	100%	100%	100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)

Capaian kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Tahun 2020 sebesar 100% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 100% dari target 100%.

### 19. Meningkatkan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak” dengan 2 (dua) indikator kinerja, untuk indikator Indeks Pemberdayaan Gender masih belum ada nilai pencapaiannya karena menunggu rilis dari BPS sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat dihitung. Untuk capaian indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak juga tidak ada capaian indikator karena tidak ada evaluasi penilaian dari Pemerintah Pusat disebabkan pandemi Covid-19.

Tabel 2.3.22  
Realisasi Sasaran 19 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	100%	BPS belum rilis	BPS belum rilis
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	1.008,90 Skor	Tidak Ada Penilaian	Tidak Ada Penilaian
<b>Rata-Rata Capaian</b>					

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020 masih belum bisa dihitung karena Indeks Pemberdayaan Gender masih belum dirilis oleh pihak BPS.

b. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak

Capaian kinerja Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020 tidak ada capaian indikator karena tidak ada evaluasi penilaian dari Pemerintah Pusat disebabkan pandemi Covid-19.

**20. Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama**

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Toleransi dan komunikasi antar umat beragama Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 50% dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.23  
Realisasi Sasaran 20 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	50%	50%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					

Pencapaian indikator persentase penyelesaian konflik sosial Tahun 2020 sebesar 50% dengan predikat “**Cukup Berhasil**”. Capaian ini

didapat dari perbandingan realisasi sebesar 50% dengan target sebesar 100%.

## 21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya” dengan 1 (Satu) indikator kinerja mencapai 57% dan termasuk predikat “**Cukup Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.24  
Realisasi Sasaran 21 Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	80%	45,33%	57%

Pencapaian indikator Indeks Pelestarian Seni dan Budaya Tahun 2020 sebesar 57% dengan predikat “**Cukup Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 45,33% dengan target sebesar 80%.

## C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja per sasaran 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel dan analisisnya berikut :

### 1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Tabel 2.3.25  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,23	5,46	5,71
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,19	13,20

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,23 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020

mengalami kenaikan sebesar 0,25 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah 2 tahun terakhir sebesar 0,24.

- 2) Indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,12 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah 2 tahun terakhir sebesar 0,065.

## 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.3.26  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,94	71,22	71,41

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

1. Indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,28 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,19 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Harapan Hidup 2 tahun terakhir sebesar 0,375.

## 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2.3.27  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	20,16%	19,48%	20,18%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,79%	2,17%	2,84%
		Penurunan Masalah Sosial	%	0,25%	0,45%	0,50%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Kemiskinan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami

Peningkatan sebesar 0,7 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Kemiskinan 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,69.

- 2) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,38 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,67 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 2 tahun terakhir Mengalami Kenaikan sebesar 0,525.
- 3) Indikator Penurunan Masalah Sosial pada tahun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,05 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Penurunan Masalah Sosial 2 tahun terakhir sebesar 0,035.

#### 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Tabel 2.3.28

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
				2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	67,12%	67,12%	65,85%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	91,92%	91,92%	94,35%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	-	71,08%	71,50%	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :					
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang			304.161	186.233
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit			35	35

- 1) Capaian kinerja indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 67,12, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,27 persen. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,635.
- 2) Capaian kinerja Indikator Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 91,79. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen. Dengan demikian capaian rata-rata

indikator Proporsi Jumlah Jembatan 2 tahun terakhir Mengalami Kenaikan sebesar 1,21.

- 3) Indikator Kinerja Irigasi merupakan indikator baru di RPJMD perubahan sehingga penghitungannya baru dilakukan pada tahun 2019. Realisasi kinerja irigasi pada tahun 2019 mencapai 71,08%, dan untuk tahun 2020 mencapai 71,50 %. Jadi ada kenaikan sebesar 0,42% antara tahun 2020 dengan tahun 2019.
- 4) Indikator Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan Terdiri dari Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan dan Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan merupakan indikator baru di RPJMD perubahan sehingga penghitungannya baru dilakukan pada tahun 2019. Realisasi Indikator Headway rata-rata angkutan pedesaan pada tahun 2019 mencapai 35 menit. Untuk realisasi tahun 2020, realisasinya sama dengan 2019 yaitu 35 menit.

## 5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai

Tabel 2.3.29

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81,28%	82,75%	81,15%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	%	81,28%	82,75%	81,15%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	%	3%	2,80%	0,10%
		Rasio elektrifikasi	%	60,59%	65,22%	78,95%

- 1) Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,47 dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 1,6 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 1,5.
- 2) Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,47 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan 1,6 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata

indikator Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,535.

- 3) Indikator Persentase Penurunan Luas Area Kumuh pada tahun 2019 mengalami Peningkatan Capaian kinerja penurunan luas area kumuh sebesar 0.2 dari tahun 2018. Pada tahun 2020 juga mengalami Peningkatan Capaian kinerja penurunan luas area kumuh sebesar 2,7 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Penurunan Luas Area Kumuh 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,45.
- 4) Indikator Rasio elektrifikasi pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 4,63 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 13,73 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Rasio elektrifikasi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 9,18.

## 6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Tabel 2.3.30

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai		63,33	67,78	60.00
		Indeks kualitas udara		87,27	88,52	88.76
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi		73,91	74,15	74.27

- 1) Indikator kualitas air sungai pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 4,45 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 Indikator kualitas air sungai mengalami penurunan sebesar 7,78 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks kualitas air sungai 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 6,115
- 2) Indikator kualitas udara pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,25 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 0,24 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks kualitas udara 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,705.

- 3) Indikator Tutupan Lahan/Vegetasi pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,24 dari tahun sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 0,12 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,18

## 7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Tabel 2.3.31

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani		-	101,4	102,53
		Nilai Tukar Nelayan		BPS Belum Rilis	BPS Belum Rilis	BPS Belum Rilis

- 1) Indikator Nilai Tukar Petani merupakan indikator baru di RPJMD perubahan sehingga penghitungannya baru dilakukan pada tahun 2019. Capaian indikator nilai tukar petani pada tahun 2019 mencapai 101,5, sedangkan untuk tahun 2020 mencapai 102,53. Artinya ada kenaikan sebesar 1,13 untuk 2 tahun terakhir.
- 2) Indikator Nilai Tukar Nelayan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 belum dirilis oleh BPS

## 8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.3.32

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura				
		Padi	Ton	199.958,27	225.484,59	254.323,35
		Jagung	Ton	406.462,92	434.403,16	361.737,66
		Kedelai	Ton	22.876,89	6.244,01	347,14
		ubi Kayu	Ton	25.575,53	25.760,60	41.889,50
		Produksi Hasil Perkebunan				
		Kelapa	Ton	44.360,33	44.376,40	44.180,09
		Tembakau	Ton	7.707,10	8.494,02	5.901,59
		Cabe Jamu	Ton	10.314,96	10.333,80	10.299,68
		Jambu Menté	Ton	6.523,37	7.971,83	5.380,86
		siwalan	Ton	753,04	753,04	750,57
		Produksi Hasil Peternakan				
		Daging (ton)	Ton	4.629,70	4.970,43	5.253,502
		Telur (ton)	Ton	3.298,745	4.218,023	4.231,8
		Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton)	Ton	47.927,52	48.576,86	42.795
		Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	Ton	661.676,02	4.188,01	6.105,77

- 1) Capaian Produksi tanaman pangan dan hortikultura Terdiri dari :
  - a) Padi pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 25,526.32 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 28.838,76. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Padi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 27.182,54
  - b) Jagung pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 27,940.24 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 72.665,5. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jagung 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 22.362,48
  - c) Kedelai pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 16,632.88 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 5.896,87 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jagung 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 11.264,875
  - d) Ubi Kayu pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 185.07 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 16.128,9 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jagung 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 8.156,985.
- 2) Capaian Produksi Hasil Perkebunan Terdiri dari :
  - a) Kelapa pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 16,07 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 196,31 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Kelapa 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 90,12.
  - b) Tembakau pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 786.92 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 2.592,43 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Tembakau 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 902,755.
  - c) Cabe Jamu pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 18.84 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 34,12 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata

indikator Cabe Jamu 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 7,64.

- d) Jambu Mente pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,448.46 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.590,97 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jambu Mente 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 571,255.
  - e) Siwalan pada tahun 2019 Tidak mengalami Perubahan dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,47. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Siwalan 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,235.
- 3) Capaian Produksi Hasil Peternakan Terdiri dari :
- a) Daging (Ton) pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 340,73 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 283,072 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Daging 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 311,901.
  - b) Telur (ton) pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 919,278 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Peningkatan sebesar 933,05 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Telur (ton) 2 tahun terakhir mengalami Peningkatan sebesar 926,164.
  - c) Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton) pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 649.34 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 5.783 Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton) 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 2.566,83.
  - d) Jumlah produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 657.488,01 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.917,76 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah produksi hasil perikanan budidaya 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 327.785,125.

## 9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Tabel 2.3.33  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	97,2	96,8	96,5

1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,4 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 0,3 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,35

## 10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Tabel 2.3.34  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,23%	0,24%	0,13%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	8,17%	7,01%	-7,56%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	9,59%	9,15%	-1,49%

- 1) Indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,01 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 0,11 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,05
- 2) Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 1,16 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 0,55 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,855

- 3) Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,44 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 7,51 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 3,975.

## 11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Tabel 2.3.35  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	3,15 %	4,5 %	4,5%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	%	6,21 %	7,11 %	7,50%

- 1) Indikator Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,35 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan prosentase yang sama dengan tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Koperasi Sehat 2 tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,675.
- 2) Indikator Persentase Pertumbuhan UMKM pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,9 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 0,39 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Pertumbuhan UMKM 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,645.

## 12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Tabel 2.3.36  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	133%	102%	49,65%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	0,84%	0,91%	0,066%

- 1) Indikator Persentase Kunjungan Wisatawan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 31% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 juga mengalami Penurunan sebesar 52,35% dari tahun

2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Kunjungan Wisatawan 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 41,675%.

- 2) Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,07% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,844% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,774%.

### 13. Meningkatnya Daya Tarik Investor

Tabel 2.3.37  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	Orang	4.156	4.260	5.754
		Jumlah Nilai Investor	Rp.	1.850.649.367.233	1.896.914.558.750	1.948.131.251.836

- 1) Indikator Jumlah Investor pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 104 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sejumlah 1.494 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah Investor 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 799.
- 2) Indikator Jumlah Nilai Investor pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 46.265.191.517 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 51.216.693.086 dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah Nilai Investor 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 48.740.942.301,5

### 14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.38  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,28%	9,81%	11,5%

- 1) Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,53% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 1,69% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 1,61%.

## 15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.39  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		B	B	
		Opini BPK		WTP	WTP	Proses Audit BPK
		Peringkat LPPD		10	10	Belum Rilis

Realisasi Indikator Nilai SAKIP masih belum dirilis, demikian juga untuk indikator Opini BPK dan Peringkat LPPD masih belum rilis.

## 16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.40  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
				2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		3,25	3,25	3,25	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian		81	85	83,06	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo		80	85	89,26	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan		NA	4,36	91	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan		82,92	82,23	82,17	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan		n/a	76,96	78,92	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM		81,53	85,25	88,15	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat		81,53	85,25	88,15	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang		75,13	85,33	85,60	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD		74,37	78,37	78,27	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD		74,79	92,29	92,29	
		E-Government					
		Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government				66	75
Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan				66	75	67	

- 1) Capaian Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik Terdiri dari :
  - a) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan pada tahun 2019 tidak mengalami Kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Begitupun untuk tahun 2020 tidak ada kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan 2 tahun terakhir baik sebesar 0%.
  - b) Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 4% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,94% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 1,03%.
  - c) Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 5% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 4,25% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 4,75%.
  - d) Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan pada tahun 2019 sebesar 4,36%, untuk tahun 2020 Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan mencapai 91%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kenaikan sekitar 86,64%
  - e) Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,69% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 juga mengalami Penurunan sebesar 0,06% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,375%.
  - f) Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan pada tahun 2019 sebesar 76,96%. untuk tahun 2020 nilai SKM Unit-unit Layanan

Sekretariat Dewan mencapai 78,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kenaikan sekitar 1,96%

- g) Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 3,72% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 2,9% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 3,31%.
- h) Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 3,72% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 2,9% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 3,31%.
- i) Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang E-Government pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 0,03%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 10,2% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang E-Government 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 10,23%.
- j) Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E- secara keseluruhan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 9% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,5%.
- k) Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 9% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Jumlah OPD Yang Telah Terintegrasi E-Government nya secara keseluruhan 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,5%.

## 17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Tabel 2.3.41  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	%	1,52%	1,52%	28,52%
		Persentase Desa Mandiri	%	0	0	0,00%
		Persentase Desa Tertinggal	%	52,73%	30,30%	100%

- 1) Indikator Persentase BUMDes yang sehat pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 1.52% sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 27% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase BUMDes yang sehat 2 tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 14,26%.
- 2) Indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Pengalami Persamaan Sebesar 0%.
- 3) Indikator Persentase Desa Tertinggal pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 22,43% dari tahun sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 69,7% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Desa Tertinggal 2 tahun terakhir mengalami Peningkatan sebesar 23,635%.

## 18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 2.3.42  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	%	91,52%	93,15%	100%

Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,63% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 6,85% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 4,24%.

## 19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 2.3.43  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		53,81	60,99	BPS Belum Rilis
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak		639	909,6	Tidak Ada Penilaian

- 1) Indikator Pemberdayaan Gender pada tahun 2019 mengalami Peningkatan sebesar 7,18 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 BPS Belum Merilis.
- 2) Indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 270,6 dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 tidak ada capaian indikator karena tidak ada evaluasi penilaian dari Pemerintah Pusat disebabkan pandemi Covid-19.

## 20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Tabel 2.3.44  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	83%	100%	50%

Indikator Persentase Penyelesaian konflik sosial pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 17% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 50% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Penyelesaian konflik sosial 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 16,5%.

## 21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Tabel 2.3.45  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	%	63%	77,45%	45,33%

Indikator Pelestarian Seni dan Budaya pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 14,45% dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32,12% dari tahun 2019. Dengan demikian capaian rata-rata Indeks Pelestarian Seni dan Budaya 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 8,835.

Dari uraian perbandingan antara realisasi kinerja persasaran tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tersebut di atas, dapat kami kelompokkan realisasi sasaran/IKU berdasarkan IKU tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3.46  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan IKU tahun 2020

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi			
				2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,94	71,22	71,41	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Penurunan Masalah Sosial	%	0,25	0,45	0,5	
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	67,12	67,12	65,85	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	71,08	71,08	71,5	
		Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan					
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	-	304.161	186.233	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	-	35	35	
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Skor	-	101,4	102,53	
		Nilai Tukar Nelayan	Skor	Belum rilis	belum rilis	Belum rilis	
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,23	0,24	0,13	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Ton	8,17	7,01	Belum rilis	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	9,59	9,15	Belum rilis	
6	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	6,21	7,11	7,50	

7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	IKM Unit-unit Layanan Publik				
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indelk	3,25	3,25	3,25
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	Nilai	81	85	83,06
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	Nilai	80	85	89,26
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	Nilai	NA	4,36	91
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	Nilai	82,92	82,23	82,17
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	Nilai	n/a	76,96	78,92
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	Nilai	81,53	85,25	88,15
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	Nilai	81,53	85,25	88,15
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	Nilai	75,13	85,33	85,60
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	Nilai	74,37	78,37	78,27
		Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	Nilai	74,79	92,29	92,29

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU tahun 2020 sebesar 103,39%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa peningkatan capaian realisasi kinerja dari tahun ke tahun CUKUP STABIL.

#### D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Tabel 2.3.47

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,71	7,65	74,64%
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,94	94,69%

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Angka Rata-rata lama Sekolah sampai dengan tahun 2020 sebesar 5,71 tahun, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 7,65 tahun. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 74,64%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 25,36%.
- 2) Capaian sasaran strategis indikator Angka Harapan lama Sekolah sampai dengan tahun 2020 sebesar 13,20 tahun, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 13,94 tahun. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 94,69%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 5,31%.

## 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.3.48

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,41	71,50	99,87%

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH) sampai dengan tahun 2020 sebesar 71,41 tahun, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 71,50 tahun. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 99,87%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 0,13%.

## 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2.3.49

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	20,18%	19,16 %	94,94%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,84%	1,85%	65,14%
		Penurunan Masalah Sosial	%	0,50%	0,55%	110%

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Angka Kemiskinan sampai dengan tahun 2020 sebesar 20,18%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 19,16%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 94,94%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 5,06%.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2020 sebesar 2,84%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 1,85%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 65,14%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 34,86%.
- 3) Penurunan Masalah Sosial sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,50%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 0,55%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 110%. Capaian kinerja Penurunan Masalah Sosial sampai dengan tahun 2020 melebihi target RPJMD kedepan sebesar 10%.

#### 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Tabel 2.3.50

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	65,85%	65,46 %	100,59%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	94,35%	60 %	157,25%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	71,50%	77 %	92,85%	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :					
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	186.233	322.164	57,80%	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	35	30	85,71%	

- 1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sampai dengan tahun 2020 sebesar 65,85%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 65,46%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 100,59%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 0,59%.
- 2) Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sampai dengan tahun 2020 sebesar 94,35%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 60% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 157,25%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 57,25%.
- 3) Indeks Kinerja Irigasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 71,50%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 77%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 92,85%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 7,15%.
- 4) Capaian Indikator Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan terdiri dari:
  - a) Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan sampai dengan tahun 2020 sebesar 186.233 Orang sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 322.164 Orang. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai

dengan 2020, maka tercapai sebesar 57,80%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 42,2%.

- b) Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan sampai dengan tahun 2020 sebesar 35, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 30. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 85,71%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 14,29%.

## 5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai

Tabel 2.3.51  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGE T 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81,15%	100 %	81,15%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	%	81,15%	100 %	81,15%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	%	0,10%	5 %	2%
		Rasio elektrifikasi	%	78,95%	64,47	122,46%

- 1) Persentase rumah tinggal bersanitasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 81,15% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 81,15%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 18,85%.
- 2) Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih sampai dengan tahun 2020 sebesar 81,15% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 81,15%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 18,85%.
- 3) Persentase Penurunan Luas Area Kumuh sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,10%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 5%

Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 2%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 98%.

- 4) Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 78,95% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 64,47%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 122,46%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 22,46%.

## 6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Tabel 2.3.52  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai		60,00	70,00	85,71%
		Indeks kualitas udara		88,76	80,56	110,17%
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi		74,27	76,30	97,33%

- 1) Indeks kualitas air sungai sampai dengan tahun 2020 sebesar 60,00% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 70,00%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 85,71%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 14,29%.
- 2) Indeks kualitas udara sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,76%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 80,56% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 110,17%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 10,17%.
- 3) Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 74,27% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 76,30%%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas

capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 97,33%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 2,67%.

## 7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Tabel 2.3.53  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani		102,53	115,30	88,92%
		Nilai Tukar Nelayan		BPS Belum Rilis	119,70	-

- 1) Angka Nilai Tukar Petani sampai dengan tahun 2020 sebesar 102,53% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 115,30%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 88,92%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 11,08%.
- 2) Angka Nilai Tukar Nelayan target pada tahun RPJMD sebesar 119,70%. Capaian 2020 belum dirilis sehingga Capaian Akhir RPJMD Belum dapat dihitung.

## 8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.3.54  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura					
		Padi	Ton	254.323,35	241.088,0	105,48%	
		Jagung	Ton	361.737,66	457.444,6	79,07%	
		Kedelai	Ton	347,14	8.010,3	4,33%	
		ubi Kayu	Ton	41.889,50	108.635,0	38,55%	
		Produksi Hasil Perkebunan					
		Kelapa	Ton	44.180,09	42.663,9	103,55%	
		Tembakau	Ton	5.901,59	9.242,3	63,85%	
		Cabe Jamu	Ton	10.299,68	9.868,2	104,37%	
		Jambu Menté	Ton	5.380,86	4.822,3	111,58%	
		siwalan	Ton	750,57	776,4	96,67%	
		Produksi Hasil Peternakan					
		Daging (ton)	Ton	5.253,502	4.609,831	113,96%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Telur (ton)	Ton	4.231,8	2.931,098	144,37%
		Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton)	Ton	42.795	49.500,0	86,45%
		Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	Ton	6.105,77	707.260,0	0,86%

1) Capaian produksi tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari :

- a) Padi sampai dengan tahun 2020 sebesar 254.323,35 sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 241.088,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 105,48%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 5,48%.
- a) Jagung sampai dengan tahun 2020 sebesar 361.737,66. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 457.444,6. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 79,07%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 20,93%.
- b) Kedelai sampai dengan tahun 2020 sebesar 347,14. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 8.010,3. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 4,33% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 95,67%.
- c) Ubi Kayu sampai dengan tahun 2020 sebesar 41.889,50. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 108.635,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 38,55% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 61,45%.

2) Capaian produksi Hasil Perkebunan terdiri dari :

- a. Kelapa sampai dengan tahun 2020 sebesar 44.180,09. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 42.663,9. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 103,55%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 3,55%.
  - b. Tembakau sampai dengan tahun 2020 sebesar 5.901,59. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 9.242,3. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 63,85% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 36,15%.
  - c. Cabai Jamu sampai dengan tahun 2020 sebesar 10.299,68. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 9,868,2. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 104,37%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 4,37%.
  - d. Jambu Mente sampai dengan tahun 2020 sebesar 5.380,86. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 4.822,3. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 111,58%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 11,58%.
  - e. Siwalan sampai dengan tahun 2020 sebesar 750,57. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 776,4. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 96,67% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 3,33%.
- 3) Capaian produksi Hasil Peternakan terdiri dari :
- a. Daging sampai dengan tahun 2020 sebesar 5.253,502. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 4.609,831. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas

capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 113,96%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 13,96%.

- b. Telur sampai dengan tahun 2020 sebesar 4.231,8. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 2.931,098. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 144,37% . Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 44,37%.
- c. Jumlah Produksi Hasi Perikanan sampai dengan tahun 2020 sebesar 42.795. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 49.500,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 86,45% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 13,55%.
- d. Jumlah Produksi Hasi Perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2020 sebesar 6.105,77. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 707.260,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 0,86% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 99,14%.

## 9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Tabel 2.3.55  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96,5	79,5	117,61%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sampai dengan tahun 2020 sebesar 96,5%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 79,5% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 117,61%. Capaian kinerja yang

dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 17,61%.

## 10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Tabel 2.3.56  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,13%	0,15 %	86,66%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-7,56	13,97 %	54,11%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	-1,49	6,77%	22%

- 1) Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,13%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 0,15% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 86,66%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 13,34%.
- 2) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sampai dengan tahun 2020 sebesar -7,56% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 13,97%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 54,11%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 45,89%.
- 3) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian sampai dengan tahun 2020 sebesar -1,49%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 6,77% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 22%. Sisa Capaian kinerja yang harus tahun-tahun kedepan sebesar 78%

## 11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Tabel 2.3.57  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	4,5%	3 %	150,00%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	%	7,50%	10 %	75%

- 1) Persentase Koperasi Sehat sampai dengan tahun 2020 sebesar 4,5%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 3%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 150,00%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 50%.
- 2) Persentase Pertumbuhan UMKM sampai dengan tahun 2020 sebesar 7,50% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 10%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 75%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 25%.

## 12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Tabel 2.3.58  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	49,65%	90%	55,16%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	0,066%	15%	0,44%

- 1) Persentase Kunjungan Wisatawan sampai dengan tahun 2020 sebesar 49,65% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 90%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 55,16%. Sisa

capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 44,84%.

- 2) Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,066% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 15%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 0,44%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 99,56%.

### 13. Meningkatkan Daya Tarik Investor

Tabel 2.3.59  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	Orang	5.754	6,827	84,28%
		Jumlah Nilai Investor	Rp.	1.948.131.251.836	481,620,593,307	404,49%

- 1) Jumlah Investor sampai dengan tahun 2020 sebesar 5.754 sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 6,827. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 84,28%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 15,72%.
- 2) Jumlah Nilai Investor sampai dengan tahun 2020 sebesar 1.948.131.251.836, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 481.620.593.307. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 404,49%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 304,49%.

### 14. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.60  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Pemerintah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	11,50%	105,99%

- 1) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar 11,50% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 10,85%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 105,99%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 5,99%.

## 15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.61

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		B	BB	98%
		Opini BPK		Proses Audit BPK	WTP	-
		Peringkat LPPD		Belum Rilis	7	-

- 1) Nilai SAKIP sampai dengan tahun 2020 belum Rilis.
- 2) Opini BPK sampai dengan tahun 2020 masih belum rilis karena masih proses BPK. Namun melihat *track record* di dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Sumenep mendapatkan predikat WTP, sehingga Kabupaten Sumenep optimis Opini BPK ini dapat dipertahankan mengingat kinerja yang terus ditingkatkan dan terus menerus melakukan perbaikan.
- 3) Peringkat LPPD untuk tahun 2020 masih belum rilis dari Kemendagri, sedangkan target pada tahun RPJMD adalah peringkat 7.

## 16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Tabel 2.3.62

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik				
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		3,25	3.1	104.83%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian		83,06	99	83,89%
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo		89,26	83	107.54%

	Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	91	95	95,78%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	82,17	83	99%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	78,92	82	96,24%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	88,15	87	101,32%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	88,15	87	101,32%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	85,60	87	98,39%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	78,27	80	97,83%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	92,29	90	102,54%
	E-Government			
	Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	67	31	216,12%
	Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan	67	31	216,12%

1) Capaian Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik terdiri dari :

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,25%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 3,1%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 104,83% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 4,83%.
- b) Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian sampai dengan tahun 2020 sebesar 83,06%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 99%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 83,89% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 16,11%.
- c) Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo sampai dengan tahun 2020 sebesar 89,26%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 83%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 107,54%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 7,54%.

- d) Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan sampai dengan tahun 2019 sebesar 91%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 95%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 95,78 % Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 4,22%.
- e) Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan sampai dengan tahun 2019 sebesar 82,17%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 83%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 99 % Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 1%.
- f) Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan sampai dengan tahun 2020 sebesar 78,92%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 82%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 96,24% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 3,76%.
- g) Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,15%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 87%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 101,32%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 1,32%.
- h) Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,15%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 87%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 101,32%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 1,32%.
- i) Nilai SKM Unit-unit Layanan BPBD sampai dengan tahun 2020 sebesar 78,27%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 80%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai

sebesar 97,83%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 2,17%.

- j) Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD sampai dengan tahun 2020 sebesar 92,29%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 90%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 102,54%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 2,54%.
- k) Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government sampai dengan tahun 2020 sebesar 67% Sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 31%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 216,12% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 116,12%.
- l) Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan sampai dengan tahun 2020 sebesar 67% Sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 31%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 216,12% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sebesar 116,12%.

## 17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Tabel 2.3.63  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	%	28,52%	59%	48,33%
		Persentase Desa Mandiri	%	0.00%	0.0%	0.00%
		Persentase Desa Tertinggal	%	35,75%	37.27%	95,92%

- 1) Persentase BUMDes Yang Sehat sampai dengan tahun 2020 sebesar 28,52%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 59%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 48,33% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 51,676%.
- 2) Persentase Desa Mandiri sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,00%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 0,0%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 0,00% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 100%.
- 3) Persentase Desa Tertinggal sampai dengan tahun 2020 sebesar 35,75%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 37,27%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 95,92% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 4,08%.

## 18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 2.3.64

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	%	100%	100%	100%

1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 100%.

## 19. Meningkatkan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 2.3.65  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		BPS Belum Rilis	100	BPS Belum Rilis
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak		Tidak ada penilaian	1109.79	Tidak ada penilaian

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender sampai dengan tahun 2020 Belum ada Capaian belum sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka Belum tercapai.
- 2) Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak sampai dengan tahun 2020 belum ada penilaian dari Pemerintah Pusat disebabkan pandemi Covid-19 adapun target pada tahun RPJMD sebesar 1109,79.

## 20. Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Tabel 2.3.66  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	50%	100%	50%

Persentase Penyelesaian konflik sosial sampai dengan tahun 2020 sebesar 50%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 50%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 50%.

## 21. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Tabel 2.3.67  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 21 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya		45,33%	80%	56,66%

Indeks Pelestarian Seni dan Budaya sampai dengan tahun 2020 sebesar 45,33%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 80%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 56,66% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 43,34%.

### **CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN AKHIR RPJMD**

Realisasi/Capaian kinerja sasaran tahun 2020 sebagaimana diurai di atas, akan menjadi outcome terhadap tujuan RPJMD. Indikator tujuan RPJMD merupakan indikator kinerja makro yang akan dicapai pada akhir RPJMD. Adapun target dan realisasi indikator kinerja Tujuan tahun 2020 serta tingkat capaian terhadap akhir RPJMD dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.68  
Capaian Indikator Kinerja Tujuan/Makro Tahun 2020  
Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,43	68,31	97,24%
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan Dan Wilayah Kepulauan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	9,00	8,00	112,5%
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,77	75,69	98,78%
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	-1,13	6,79	-16,64
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel	Nilai SKM	Belum Rilis	95,8	Belum Rilis
6	Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	0,6647	0,6455	102,97%
7	Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Keamanan	Belum Rilis	80,2	Belum Rilis
8	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Dilandasi Dengan Semangat Nasionalisme Dan Kearifan Lokal	Indeks Toleransi	Belum Rilis	89,2	Belum Rilis

Berdasarkan tabel di atas kami optimis target indikator kinerja tujuan/makro RPJMD pada akhir periode akan tercapai dengan beberapa alasan diantaranya :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupten Sumenep sampai dengan tahun 2020 sebesar 66,43, sedangkan target akhir RPJMD 68,31 sehingga capaian kinerja terhadap akhir RPJMD sebesar **97,24% (Sangat Berhasil)** atau sisa 2,76%. Capaian IPM Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 3 sasaran yaitu :
  - a. Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 90%.
  - b. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 100%.
  - c. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 118%.
2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan ukuran kualitas atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Sumenep tahun 2020 sebesar 77,83% dengan target 8,00 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,28%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 97,28% sehingga sisa target yang harus dicapai sebesar 2,72%. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :
  - a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 97%.
  - b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 58,66%.
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2020 sebesar 74,77 dengan target 75,69 sehingga capaian kinerja 98,78%. Capaian

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 1 sasaran yaitu :

- a. Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 98,78%.
4. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Capaian Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 8 sasaran yaitu :
  - a. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja masih belum bisa ditentukan, ini disebabkan indikator Nilai Tukar Nelayan tahun 2020 masih belum dirilis oleh BPS. Untuk Indikator Nilai Tukar Petani capaian Akhir RPJMD sampai dengan tahun 2020 sebesar 95%.
  - b. Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 111,94%.
  - c. Sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 124,90%.
  - d. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 54,66%.
  - e. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 93,75%.
  - f. Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 27,5%.
  - g. Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investor tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 251,5%.
  - h. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 103%.
5. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Capaian Nilai SKM Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :

- a. Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja masih belum dapat dihitung capaian kinerjanya. Ini karena ada satu indikator yaitu Peringkat LPPD yang masih belum rilis dari Kemendagri. Untuk Indikator Nilai SAKIP capaian kinerja tahun 2020 juga belum dirilis serta Opini BPK masih proses audit BPK.
  - b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 119,38%.
6. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun pada tahun 2020 sebesar 0,6647 dari target 0,6455 sehingga capaian kinerja sebesar 102,97%. Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 1 sasaran yaitu :
- a. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 84,33%.
7. Capaian Indeks Keamanan Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :
- a. Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 100%.
  - b. Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja masih belum dapat dihitung capaian kinerjanya. Ini karena ada satu indikator yaitu Indeks Pemberdayaan Gender masih belum rilis dari BPS. Untuk Indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020 tidak ada capaian indikator karena tidak ada evaluasi penilaian dari Pemerintah Pusat disebabkan pandemi Covid-19.

8. Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :
- Sasaran Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 50%.
  - Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya tahun 2020 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 45,33%.

## E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI.

### 1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.69  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,83	5,71	83,60%	4.234.815.150,00	4.130.833.900,00	97,54%	-13,94%
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,20	96%	101.490.158.246,76	96.476.210.612,00	95,05%	0,95%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan adalah sebesar -6,495% dengan rincian indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah tingkat efisiensi sebesar -13,94% dan indikator Angka Harapan Lama Sekolah tingkat efisiensi sebesar 0,95%. Pada Tahun 2020 sasaran meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dicapai dengan **Efisien**.

## 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.3.70  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
2	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,32	71,41	100%	2.623.414.000	2.557.200.784	97,54%	2,46%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat adalah sebesar 2,46%, sehingga sasaran ini dicapai dengan **Efisiensi**.

## 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut

Tabel 2.3.71  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	19,34	20,18	104%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,9	2,84	149%
		Penurunan masalah sosial	%	0,5	0,5	100%

Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain, Angka Kemiskinan sebesar 104%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 149% dan indikator Penurunan Masalah Sosial tingkat efisiensi sebesar 100%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dicapai dengan **Efisiensi**.

#### 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 2.3.72  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran		
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,67 %	65,85%	102%	132.815.156.809,50	127.331.140.060,8	95,87%	6,13%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	86,93 %	94,35%	109%	4.908.854.900,00	4.776.056.855,00	97,29%	11,71%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	73 %	71,50%	98%	13.710.886.460	12.587.115.593	91,80%	6,2%	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan									
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	315.866	186.233	59%	101.399.109.531	82.031.879.610,579	80,9%	36,1%	
		Headway Rata-Rata Angkutan Pedesaan	Menit	30	35	117%					

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur adalah sebesar 15,035%. Sasaran ini di dukung 4 (empat) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 6,13%, Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 11,71%, Indeks Kinerja Irigasi sebesar 6,2% dan Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan dengan 36,1%. Pada Tahun 2020 sasaran meningkatnya Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dicapai dengan **Efisiensi**.

## 5. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai sebagai berikut :

Tabel 2.3.73  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman /Perumahan Secara Memadai	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	100%	81,15%	81%	1.192.484.660,89	4.092.756.865,9	97,62%	-16,47%
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih	%	95 %	81,15%	92,98%	8.815.051.731,2	8.295.962.873,71	94,11%	-1,13%
		Persentase penurunan Luas Area Kumuh	%	5 %	0,10%	2%	658.323.503,09	641.496.003	97,44%	-95,44%
		Rasio Elektrifikasi	%	62,47%	78,95%	126%				

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai adalah sebesar -37,68%. Sasaran ini didukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar -16,47%, Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih sebesar -1,13%, Persentase Penurunan Luas Area Kumuh sebesar -95,44%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai dicapai dengan **Efisiensi**.

## 6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kelestarian Lingkungan sebagai berikut :

Tabel 2.3.74  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
6	Meningkatnya Kelestarian	Indeks Kualitas Air	%	70.00	60.00	85,71%	4.167.787.500	647.943.009	15,55%	70,16
		Indeks Kualitas Udara	%	79.17	88.76	112%	4.258.625.688	4.247.923.100	99,75	12,25
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	%	75.58	74.24	98%	491.319.350	461.512.746	93,93	4,07

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Secara Memadai adalah sebesar 28,82%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Indeks kualitas air sungai 70,16%, Indeks kualitas udara sebesar 12,25%, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi sebesar 4,07%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Secara Memadai dicapai dengan **Efisiensi**.

## 7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan sebagai berikut :

Tabel 2.3.75  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	skor	107,5	102,53	95%
		Nilai Tukar Nelayan	skor	109,2	BPS Belum Rilis	BPS Belum Rilis

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Kesejahteraan Petani dan Nelayan masih belum dapat dihitung karena untuk nilai tukar nelayan tahun 2020 masih belum rilis dari BPS, sedangkan untuk indikator Nilai Tukar Petani tingkat efisiensi sebesar 1,59%, hal ini menunjukkan bahwa indikator Nilai Tukar Petani dicapai dengan **Efisiensi**.

## 8. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 2.3.76  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura				57,7%	7.104.490.168	7.034.821.361	99,02%	-41,32%
		padi	Ton	237.525,12	254.323,35	107%				
		jagung	Ton	450.684,29	361.737,66	80,26%				
		kedelai	Ton	7.891,95	347,14	4,40%				
		Ubi kayu	Ton	107.029,6	41.889,50	39,14%				
		Produksi Hasil Perkebunan:				96,006%	4.649.304.291	4.604.182.713	47,51%	48,496%
		Kelapa	Ton	42.663,92	44.180,09	103,55%				
		Tembakau	Ton	9.242,31	5.901,59	63,85%				
		Cabe Jamu	Ton	9.868,15	10.299,68	104,37%				
		Jambu Mete	Ton	4.822,31	5.380,86	111,58%				
		Siwalan	Ton	776,37	750,57	96,68%				
		Produksi Hasil Peternakan				130,82%	2.901.923.000	1.384.166.044	47,70%	83,12%
		Daging (Ton)	Ton	4.564,189	5.253,502	115,10%				
		Telur ((Ton)	Ton	2.887,782	4.231,8	146,54%				
		Produksi Hasil Perikanan:				241,39%	7.234.269.160	6.887.953.705	95,21%	146,16%
		Jumlah produksi Hasil Perikanan	Ton	49.000	42.795	87,34%				
Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budaya	Ton	1.544	6.105,77	395,45%						

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan adalah sebesar 59,114%. Sasaran ini di dukung 4 (empat) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar -41,32%, Produksi Hasil Perkebunan sebesar 48,496%, Produksi Hasil Peternakan sebesar 83,12% dan Produksi Hasil Perikanan sebesar 146,16%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan dicapai dengan **Efisiensi**.

## 9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan sebagai berikut :

Tabel 2.3.77  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	78,5	96,5	123%	207.600.000	203.851.834	98,19%	24,81 %

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan adalah sebesar 24,81%, Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan dicapai dengan **Efisiensi**.

## 10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.3.78  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,15%	0,13%	85,71%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	13,84	-7,56%	54,62%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	6,66	-1,49	22,37%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat capaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan

Perdagangan adalah sebesar 54,23%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sebesar 85,71%, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar 54,62% dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian sebesar 22,37%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan dicapai dengan **Efisiensi**.

#### 11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

Tabel 2.3.79  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	3	4,5	150%	87.000.000	83.000.000	95,40%	54,6%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20	7,50	37,50%	3.641.945.000	3.459.267.922	94,98%	-57,48

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM adalah sebesar -1,44%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase Koperasi Sehat sebesar 54,6% dan Persentase Pertumbuhan UMKM sebesar -57,48%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM dicapai dengan **Efisiensi**.

#### 12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata sebagai berikut :

Tabel 2.3.80

## Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	90%	49,65%	55%	2.388.302.944	1.980.325.918	82,91%	-27,91
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	15%	0,066%	0,44%	1.774.937.000	505.970.030,46	84,84%	-84,4

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata adalah sebesar -56,155%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase Kunjungan Wisatawan sebesar -27,91% dan Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD sebesar -84,4%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata dicapai dengan **Efisiensi**.

### 13. Meningkatkan Daya Tarik Investor

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Daya Tarik Investor sebagai berikut :

Tabel 2.3.81

## Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	Orang	6.827	5.754	55%
		Jumlah Nilai Investor	Rp.	465.381.741.065	1.948.131.251.836	418,60%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat capaian sasaran Meningkatkan Daya Tarik Investor adalah sebesar 236,8%. Sasaran ini di dukung 2 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Jumlah Investor sebesar 55% dan Jumlah Nilai Investor sebesar 418,60%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatkan Daya Tarik Investor dicapai dengan **Efisiensi**.

#### 14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3.82  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 14

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	11,18	11,5	102,86	448.982.993	369.140.352	82,22%	20,64

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Secara Memadai adalah sebesar 20,64%. Sasaran ini di dukung 1(satu) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 20,64 %. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dicapai dengan **Efisiensi**

#### 15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3.83  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		BB	Belum Rilis	-				
		Opini BPK		WTP	Proses Audit BPK	-	3.133.293.444	1.657.964.488	78,72	21,28%
		Peringkat LPPD		10	Belum Rilis	-				

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah masih belum bisa dihitung karena indikator Nilai SAKIP, Opini BPK dan Peringkat LPPD tahun 2020 masih belum dirilis.

## 16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3.84  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 16

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran		
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik									
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks	3	3,25	108%	-	-	-	108%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian	Nilai	95	83,06	87%	491.319.350	461.512.746	93,93	4,07%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	Nilai	80	89,26	112%	-	-	-	112%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	Nilai	93	91	98%	551.232.500	326.089.746	59,16	38,84%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	Nilai	80	82,17	103%	-	-	-	103%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	Nilai	78	78,92	101%	38.382.497.743	34.468.112.213	89,80	11,2%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	Nilai	86	88,15	103%	1.120.734.715	1.085.321.916	96,84%	6,16%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	Nilai	86	88,15	103%	-	-	-	103%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	Nilai	84	85,60	102%	-	-	-	102%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	Nilai	81	78,27	97%	-	-	-	97%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	Nilai	87	92,29	106%				106%	
		E-Government									
		Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	Unit	31	67	216%	1.389.000.000	1.324.958.153	95.39	120,61%	
		Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan	Unit	31	67	216%	2.001.820.000	1.988.801.255	99.35	116,65%	

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah adalah sebesar 79,11%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Nilai SKM unit-unit Layanan Publik sebesar 71,93 % dan E-Government sebesar 118,63 %. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dicapai dengan **Efisiensi**.

#### 17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial sebagai berikut :

Tabel 2.3.85  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 17

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes yang sehat	%	54	28,52	53%
		Persentase Desa Mandiri	%	0	0	100%
		Persentase Desa Tertinggal	%	35,75	35,75	100%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial adalah sebesar 86%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase BUMDes Yang Sehat sebesar 58%, Persentase Desa Mandiri sebesar 100%, dan Persentase Desa Tertinggal sebesar 100%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial dicapai dengan **Efisiensi**.

## 18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.3.86  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	%	100	100	100%	925.150.000	905.119.098	97,83%	2,17%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Memadai adalah sebesar 2,17%. Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) sebesar 2,17%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Memadai dicapai dengan **Efisiensi**.

## 19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

Tabel 2.3.87  
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	%	100%	BPS Belum Rilis	BPS Belum Rilis
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	Skor	1.008,90 Skor	Tidak Ada Penilaian	Tidak Ada Penilaian

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum bisa dihitung karena indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 masih belum dirilis oleh BPS. Sedangkan Capaian kinerja Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020 tidak ada capaian indikator karena tidak ada evaluasi penilaian dari Pemerintah Pusat disebabkan pandemi Covid-19.

## 20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama sebagai berikut :

Tabel 2.3.88

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	100%	50%	50%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama adalah sebesar 50%. Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial sebesar 50%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama dicapai dengan **Efisiensi**.

## 21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya sebagai berikut :

Tabel 2.3.89

## Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 21

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	%	80%	45,33%	57%	2.162.859.000	980.471.401	45,33%	11,67%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya adalah sebesar 11,67%. Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelestarian Seni dan Budaya sebesar 11,67%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya dicapai dengan **Efisiensi**.

#### F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

##### a. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Adapun Meningkatkan Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan didukung dengan Program dan Kegiatan diantaranya Peningkatan Akses PAUD, Peningkatan Akses Sekolah Dasar (SD), Peningkatan Akses SMP, Peningkatan Akses PNF, Peningkatan Kualitas PAUD, Peningkatan Kualitas SD, Peningkatan Kualitas SMP, Peningkatan Kualitas PNF, Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Kualifikasi akademik PTK.

##### b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diantaranya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pembinaan Lingkungan Sosial, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya, Upaya Kesehatan Puskesmas, Sumber Daya Kesehatan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Perorangan, Pembinaan Lingkungan Sosial, Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah.

**c. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCT), Pelatihan Keterampilan Kerja, Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT, Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

**d. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya Kualitas Infrastruktur diantaranya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Inspeksi Kondisi Jalan, Tanggap Darurat Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, Tanggap Darurat Jembatan, Infrastruktur Keirigasian, Pemeliharaan, Penyediaan Air Baku Dan Pengendalian Daya Rusak Air, Penyediaan dan Pengolahan Data Serta Pemanfaatan Sumber Daya Air, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Perencanaan Penataan Ruang, Penataan Bangunan Gedung, Pelayanan Angkutan dan Pengujian Sarana, Pengembangan Sistem/Lingkungan dan Keselamatan Transportasi, Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

**e. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai diantaranya Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman.

**f. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kelestarian lingkungan diantaranya Penaatan Hukum, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Inventarisasi Data dan Informasi, Penataan Lingkungan, Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam, Penataan Laboratorium Lingkungan, Penataan TPA, Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air, Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara.

**g. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan diantaranya Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan.

**h. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya produksi pertanian dan perikanan diantaranya Produksi Pertanian, Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT), Produksi Perkebunan, Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Pengembangan Kelembagaan dan Pendataan serta Pengendalian Usaha Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pembinaan Lingkungan Sosial.

**i. Meningkatkan Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya konsumsi pangan dan keragaman pangan diantaranya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,

Peningkatan Produksi Peternakan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

**j. Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya saing sektor industri dan perdagangan diantaranya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Promosi dan Kerja sama Perdagangan, Pemberantasan Barang Kena Cukai, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

**k. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya saing sektor koperasi dan UMKM diantaranya Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam, Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi, Peningkatan Usaha Mikro, Pembinaan Lingkungan Sosial.

**l. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya tarik pariwisata diantaranya Pengembangan pemasaran pariwisata, Pengembangan destinasi pariwisata, pengawasan kepariwisataan dan Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata.

**m. Meningkatkan Daya Tarik Investor**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya tarik investor diantaranya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, Pengembangan Data/ Informasi, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan, Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan.

**n. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah diantaranya Pengembangan Potensi PAD, Administrasi Perbendaharaan Daerah, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penatausahaan dan Tata Kelola Administrasi Aset, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan.

**o. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah**

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah diantaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan disiplin ASN, Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN, Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN, Pengembangan Kompetensi SDM, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan, Pengembangan data/informasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Daerah, Fasilitasi pembinaan keagamaan, pendidikan, kepemudaaan, kesehatan, dan kemasyarakatan, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Layanan Dokumentasi, Pemberitaan Pembangunan dan keprotokolan, Penataan Produk hukum yang berkualitas, Optimalisasi Informasi Hukum dan pengawalan kasus hukum, Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah, Penataan Kelembagaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Organisasi Perangkat Daerah, Fasilitasi dan Penataan Prosedur Sistem Kebijakan Pelayanan Publik, Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Bidang energi dan sumber daya alam.

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah diantaranya Pelayanan Informasi Data Kepegawaian, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, pengembangan informasi, Komunikasi dengan media massa, Pengolahan dan pemanfaatan informasi dengan Media massa, Pemanfaatan sarana dan prasarana TIK, Persandian Daerah, pengembangan data statistik, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik, Rehabilitasi dan rekonstruksi, Budaya baca, pembinaan, pengolahan dan pengembangan perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD, Fasilitasi penyusunan dan penyajian data produk hukum DPRD, Fasilitasi kegiatan rapat dan penyusunan risalah hasil rapat DPRD.

**p. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial diantaranya Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

**q. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perempuan di Perdesaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk.

**r. Meningkatkan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak diantaranya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perempuan di Perdesaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana, Program Pengendalian Penduduk.

**s. Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama diantaranya ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan HAM.

**t. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya**

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni dan budaya diantaranya pengelolaan keragaman seni dan budaya, peningkatan peran serta kepemudaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN**

#### **❖ Dinas Perikanan**

##### **a. Dasar Hukum**

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.80 / MEN / KU.611 / 2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten /Kota dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-032.07.4.059496/2020, tanggal 11 November 2019, revisi ke VI tanggal 07 Desember 2020.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2020.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 12/PER-DJPRL/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Usaha Pergaraman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Anggaran Biaya Tambahan Tahun 2020.

##### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

**c. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang Melaksanakan**

Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

**d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**

Program : Pengelolaan Ruang Laut

Kegiatan : Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)

**Pelaksanaan :**

Program ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kuantitas garam sehingga dapat mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional.

a. Lokasi PUGaR : Desa Talango Kec. Talango, Desa Gapura Barat Kec. Gapura, dan Desa Banbaru Kec. Giligenting.

Produksi Garam Rakyat di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Produksi Garam Kabupaten Sumenep**

NO	URAIAN	PRODUKSI (ton)
1	Produksi Garam 2020	103.606,08
2	Serap Garam 2020	49.762,500
3	Stok Garam 2020	70.928,81

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Jumlah Anggaran Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.024.900.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan rincian :

- Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp. 126.869.800,- dengan rincian :
  1. Operasional Kegiatan Sebesar Rp. 92.098.800,-
  2. Sosialisasi Daerah Sebesar Rp. 12.557.100,-
  3. Rembug Daerah Sebesar Rp. 22.213.900,-
- Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat Sebesar Rp. 728.956.152,- dengan rincian :
  1. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja yaitu :

- Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Honor Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Spm;
  - Honor Bendahara Pengeluaran.
2. Belanja Honor Output Kegiatan yaitu :
- Tim Koordinasi dan Konsolidasi
  - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3. Pengerjaan Saluran/Jalan Produksi, Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan yang dilakukan di Tiga Lokasi yaitu Kec. Talango, Kec. Gapura dan Kec. Giligenting. Realisasi keuangan dari Tugas Pembantuan ini sebesar Rp. 855.825,952- atau sebesar 83,50% dari total anggaran Rp. 1.024.900.000,-.

**Permasalahan dan Kendala**

- Cuaca masih menjadi kendala utama yang setiap tahun mengalami perubahan yang tidak menentu sehingga kurang mendukung kegiatan produksi garam;
- Belum meratanya teknologi untuk produksi pada waktu musim kemarau basah;
- Kualitas garam yang dihasilkan petambak masih sangat beragam;
- Kesulitan modal bagi petambak garam maupun koperasi dalam penyerapan garam;
- Adanya dampak Covid-19 yang juga dapat menghambat kegiatan produksi garam.

**Saran dan Tindak Lanjut**

- Dilakukannya Pelatihan Teknis Teknologi Tepat Guna berupa yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi di saat musim kemarau basah;
- Perlu adanya lahan integrasi garam agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam;
- Perlunya standarisasi harga garam dalam tata niaga garam pada saat pandemi maupun tidak;

- Dibentuknya Koperasi-koparasi Garam di masing-masing kecamatan yang terdapat lahan produksi garam rakyat sehingga koperasi ini dapat berperan sebagai penyangga produksi garam rakyat di masing - masing kecamatan.
- Perlu adanya kerjasama antara petambak, koperasi dan pemerintah setempat demi memajukan swasembada garam di Kabupaten Sumenep Khususnya dan Nasional pada umumnya

### **3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN**

#### **❖ Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan**

*Urusan bidang Pertanian*, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep untuk pelaksanaan program ; 1) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian, 2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah, dan 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.374.665.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur pertanian, peningkatan produksi jagung dengan memberikan benih dan menambah produksi serta nilai tambah bawang merah dengan memberikan benih bawang merah berkualitas kepada masyarakat.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel : 4.2**

#### **Alokasi dan realisasi anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Tahun 2020**

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	Dinas Pertahortbun	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian	1.990.440.000	1.844.466.000	92,67	SP.DIPA 018.08.4.059185/201 9

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
2	Dinas Pertahortbun	Peningkatan Produksi & Nilai Tambah	144.250.000	144.072.000	99,87	SP.DIPA 018.04.4.059179/202 0 tgl. 19 Juni 2020
3	Dinas Pertahortbun	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	239.975.000	227.275.000	94,71	SP.DIPA 018.03.4.059178 /2019
<b>Total</b>			<b>2.374.665.000</b>	<b>2.215.813.000</b>	<b>93,48</b>	

### **Permasalahan :**

- Kesadaran dan minat petani untuk ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) rendah
- Pemasaran hasil produk masih di tingkat lokal

### **Upaya Penyelesaian**

- Dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran petani untuk ikut AUTP perlu adanya kegiatan sosialisasi yang memeberikan pemahaman tentang manfaat AUTP
- Perlu adanya jaringan pangsa pasar yang lebih luas untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh petani.

## **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)**

### **4.1 URUSAN PENDIDIKAN**

#### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Urusan Desentralisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2020, menetapkan bahwa pengelolaan kegiatan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai , yaitu

- (a) Meningkatnya akses pendidikan, dengan program ; peningkatan akses PAUD, peningkatan akses SD, peningkatan akses SMP, peningkatan akses PNF, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,
- (b) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan program ; peningkatan kualitas PAUD, peningkatan kualitas SD, peningkatan kualitas SMP, peningkatan kualitas PNF, dan kualifikasi akademik PTK,
- (c) peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF, SD dan SMP,
- (d) Meningkatnya sarana layanan perkantoran, dengan program peningkatan manajemen dan pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Disamping itu ada beberapa prioritas kegiatan urusan wajib yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten Sumenep untuk dilaksanakan yang tercantum dalam tahun anggaran 2020.

## 4.1.2 Target pencapaian SPM oleh Daerah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	KETERANGAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Setiap Tahun
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
2.	PENDIDIKAN DASAR	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Setiap Tahun
				Jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Setiap Tahun
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	

### 4.1.3 Realisasi

Realisasi pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	REALISASI	KETERANGAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	90,91 %	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Setiap Tahun
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
2	PENDIDIKAN DASAR	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	98,03 %	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Setiap Tahun
					Jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
3	PENDIDIKAN KESETARAAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	85,63 %	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Setiap Tahun
					Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran belanja dan realisasi kegiatan tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi dana	Capaian/Realisasi	%
1	Belanja Tdk Langsung	549.214.112.220,04	472.353.658.719,00	86.01
2	Belanja Langsung	108.976.336.266,76	60.359.858.697,00	55.39

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA	33
4	D	3
5	S1	24
6	S2	18
7	S3	1
<b>JUMLAH</b>		<b>82</b>

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

##### 1). Pendapatan

Realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar 91,96 % hampir sesuai target (8,04 %) yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya aktifitas penyewa sewa rumah Kepala Sekolah, guru dan Penjaga sekolah menurun ( hampir sesuai target yang sudah ditetapkan akan tetapi sewa berdasarkan aturan yang ada dan penyewa yang sudah

pensiun ), dan banyaknya gedung rumah dinas yang rusak berat. Perlu adanya biaya perawatan dan perbaikan/rehab rumah dinas.

2). Belanja tidak langsung

Dilihat dari capaian persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 86,01 % tidak mencapai target ( 13,99% ) hal ini dikarenakan adanya Kelebihan dari beberapa kegiatan diantaranya masalah Gaji dan Tunjangan serta Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, pegawai dinas pendidikan kab. Sumenep dan banyaknya pegawai yang sudah pensiun.

3). Belanja langsung

Dilihat dari capaian persentase untuk belanja langsung sebesar 55,39% tidak mencapai target (44,61%) dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pandemi Covid 19 dan juga ada beberapa penghematan dari beberapa program kegiatan.

## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

#### 4.2.2 Target Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	REALISASI		
			Penyebut	Pembilang	Nilai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	14.990	13.609	90,79%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	14.308	13.458	94,06%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	13.383	13.466	100,62%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54.365	52.378	96,34%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15.757	8.289	52,61%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	602.206	397.328	65,98%

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	REALISASI		
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	130.912	12.229	9,34%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	253.426	105.299	41,55%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.045	33.504	333,54%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.069	1.448	69,99%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	4.347	5.282	121,51%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	18.426	15.481	84,02%

#### 4.2.3 Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 1.304.100.000,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 198.670.000,00
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 497.695.000,00
4	Pelayanan kesehatan Balita	Rp. 1.958.670.000,00
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 748.015.000,00
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 771.900.000,00
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 1.454.165.000,00

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
8	Pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi	Rp. 330.887.500,00
9	Pelayanan kesehatan pada Penderita DM	Rp. 260.887.500
10	Pelayanan kesehatan ODGJ Berat	Rp. 447.480.000,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rp. 260.780.000,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	Rp. 267.205.000,00

#### 4.2.4 Dukungan Personil

NO	PELAYANAN	INDIKATOR	JUMLAH
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	150 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	90 Tenaga kesehatan
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	90 Tenaga kesehatan
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	180 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	90 Tenaga kesehatan
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	270 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	120 Tenaga kesehatan
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	150 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	120 Tenaga kesehatan
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Tenaga kesehatan
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Tenaga kesehatan

NO	PELAYANAN	INDIKATOR	JUMLAH
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Tenaga kesehatan
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Tenaga kesehatan
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	120 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Tenaga kesehatan
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	210 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Tenaga kesehatan
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	120 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Tenaga kesehatan

#### 4.2.5 Permasalahan dan Solusi

##### A. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

###### PERMASALAHAN

###### (1) Pandemi Covid 19

Pada masa pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap penurunan capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil sehingga capaian SPM belum bias mencapai 10%, hal tersebut dikarenakan harus mematuhi beberapa aturan yang berkaitan dengan aturan “ yang harus dijalani selama masa pandemic covid 19. Beberapa permasalahannya dikarenakan :

- a. Adanya pembatasan Jam layanan Puskesmas pada masa pandemic covid 19
- b. Mengurangi kunjungan ibu hamil ke fasilitas Kesehatan, karena risiko penularan virus Corona di Fasilitas Pelayanan Kesehatan cukup tinggi.

- c. Ibu Hamil enggan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya karena takut tertular Covid 19 **padahal pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin**
  - d. Adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil apabila tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan
  - e. Semua Ibu hamil tidak mau dilakukan pemeriksaan rapid test
- (2) Kurangnya informasi tentang pelayanan Ante Natal Care pada masa Pandemic Covid 19
  - (3) Masih adanya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kehamilan pada fasilitas kesehatan di luar wilayah kabupaten sumenep dan tidak ada laporan
  - (4) Jaringan puskesmas dan fasyankes swasta masih belum melaporkan semua kegiatan ke puskesmas
  - (5) Adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri.
  - (6) Sosial Budaya / adat istiadat
  - (7) Akses pelayanan dan keadaan geografis
  - (8) Semua Ibu hamil tidak mau dilakukan pemeriksaan rapid test

**SOLUSI :**

- (1) Pelayanan Kesehatan ibu hamil pada masa pandemic covid 19 era New Normal
  - a) Melakukan penjadwalan pemeriksaan kehamilan / kunjungan ibu hamil melalui media telepon agar tidak terlalu lama menunggu antrian di puskesmas.
  - b) Memantau kondisi ibu hamil melalui Antenatal Care (ANC) khususnya kunjungan K-1 dan K- 4 melalui Tele konsultasi kehamilan.
  - c) Memberikan edukasi pada semua ibu hamil tentang Adaptasi kebiasaan baru dan Protokol kesehatan bagi bumil pada masa pandemic covid 19
  - d) Mengaktifkan kembali kegiatan posyandu dan kelas bumil pada desa dengan zona hijau dan kuning dengan protokol kesehatan

dan durasi pelaksanaan kegiatan di batasi dan terjadwal dengan baik

- e) Semua Ibu Hamil usia kehamilan 38 minggu wajib dilakukan pemeriksaan Rapid test untuk deteksi dini Covid 19 dan persiapan persalinan.
- (2) Memberikan edukasi / informasi tentang penyakit Covid 19 dengan baik dan benar sehingga masyarakat paham dan mau melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai protocol kesehatan yang wajib di taati.
- (3) Koordinasi dengan semua penanggung jawab Kesehatan Keluarga di semua Kabupaten agar memberikan informasi terkait layanan kesehatan pada ibu hamil
- (4) Koordinasi dengan organisasi IBI untuk menginstruksikan kepada semua jaringan agar setiap bulan melaporkan kegiatan layanan ibu hamil di wilayah puskesmasnya.
- (5) Pengajuan Permintaan APD dan pengadaan APD yang bersumber dari APBD melalui Bidang Sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
- (6) Koordinasi dengan Lintas sector di semua kecamatan untuk membantu mendukung masyarakat untuk tetap tinggal Dirumah (Stay At Home)
- (7) Masih adanya wilayah dari Kepulauan ke kepulauan yang jauh dari jangkauan masyarakat dan geografis.
- (8) Koordinasi dengan lintas sector Kader, Babinsa, kader, TP.PKK Desa dan lain “nya

## **B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

### PERMASALAHAN :

- (1) Pandemi Covid 19
  - a) Semua Ibu hamil takut melahirkan di Puskesmas karena dilakukan rapid test pada saat melahirkan
  - b) Semua ibu hamil takut dengan petugas yang menggunakan APD level 2 atau 3 di kamar bersalin

- c) Semua ibu hamil takut melahirkan ke puskesmas karena tdk boleh di damping oleh keluarga dan masuk dalam bilik chamber
  - d) Ibu bersalin takut di diagnose covid 19 dan menganggap itu adalah aib
  - e) Masih adanya persalinan oleh dukun bayi di wilayahnya masing “
  - f) Adanya PSBB ( Penerapan Lockdown) memberikan dampak pelayanan pada kesehatan ibu bersalin yang selama ini di akses oleh masyarakat sehingga akan berdampak pada penurunan kunjungan ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Masih adanya dukun bayi yang tidak terlatih ( Turun temurun)
  - (3) Masih adanya anggapan bahwa bersalin ke bidan adalah orang yang gawat dan beresiko
  - (4) Kurangnya tenaga bidan di desa karena mutasi ke kota
  - (5) Masih banyak desa yang kosong tdk ada bidan desanya sehingga masih banyak yang bersalin ke dukun tanpa pantauan bidan desa

**SOLUSI :**

- (1) Meningkatkan kemitraan bidan dan dukun
- (2) Kampanye persalinan di fasilitas kesehatan
- (3) Koordinasi dengan lintas sector kader kesehatan,perangkat desa, babinsa dan lainnya
- (4) Penguatan program Perencanaan Persalinandan Pencegahan Komplikasi
- (5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan
- (6) Kelas Ibu Hamil di masa pandemic covid 19 sesuai dengan New Normal

**C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;**

**PERMASALAHAN**

Cakupan Kunjungan Bayi baru Lahir melebihi target 100% dikarenakan :

- (1) Jumlah Sasaran Proyeksi Kelahiran Hidup pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sehingga pencapaian Kesehatan pada Bayi Baru lahir meningkat

- (2) Mobilitas bayi yang pulang bersama ibunya di Kabupaten Sumenep tinggi karena di pengaruhi oleh masa Pandemi Covid 19
- (3) Pada awal masa pendemi covid 19ibu masih takut bayinya di periksa oleh tenaga kesehatan karena menggunakan APD lengkap

**SOLUSI :**

- (1) Sasaran Tidak bias menggunakan data Kabupaten tetapi menggunakan data proyeksi Pusdatin Kemenkes RI
- (2) Mengaktifkan kembali posyandu yang zona hijau dan zona orang dengan penjadwalan dan durasi / waktu serta wajib menggunakan protocol kesehatan baik bagi orang tuan,balita atau keluarga serta kader kesehatan
- (3) Jadwal buka hari posyandu di tambah krn jam pelayanan posyandu tdk boleh terlalu lama untuk mengkafer agar bayi bias datang ke posyandu dengan sehat
- (4) Memberitahukan kepada masyarakat tentang hari buka posyandu pada H-1,H dan H+1
- (5) Kemitraan Bidan dukun supaya semua bayi baru lahir dapat di periksa oleh tenaga kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan APD seusi Standar
- (6) Memberikan informasi tentang Bulan Timbang dan bulan vitamin A dengan menggunakan media yang ada di masing “ desa
- (7) Adanya Kelas Ibu nifas di Kabupaten Sumenep

**D. Pelayanan Kesehatan Balita :**

**PERMASALAHAN**

- (1) Pandemi Covid 19

Pelayanan Kesehatan Balita didalamnya meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tatalaksana balita sakit jika diperlukan, pada masa Pandemi covid19 cakupan kesehatan balita menurun dibandingkan pada tahun lalu karena :

- a. Orang Tua takut membawa balitanya ke posyandu krn khawatir tertular covid 19

- b. Tidak semua masyarakat punya Hp android untuk melakukan tele konsultasi kepada puskesmas
  - c. Jaringan Internet sulit sehingga petugas kesehatan tidak bias memantau pertumbuhan dan perkembangan balita lewat HP
- (2) Keadaan geografis kepulauan
  - (3) Durasi pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan sangat lama
  - (4) Pembatasan jam layanan Puskesmas pada masa pandemic covid 19
- SOLUSI :**

- (1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pandemi covid 19 dan langkah – langkah pencegahan level individu /Keluarga serta cara menjaga kesehatan anak secara mandiri di rumah
- (2) Pemantauan balita berisiko dengan tele konsultasi/ janji temu/ kunjungan rumah
- (3) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilakukan mandiri di rumah dengan mengacu pada Buku KIA
- (4) Membuka pelayanan Posyandu dengan diterapkan persyaratan ketat, pencegahan infeksi dan physical distancing ( Protokol Kesehatan)
- (5) Menambah Jam buka posyandu pada zona hijau dan orang
- (6) Koordinasi dengan kader kesehatan di desa

**E. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;**

Capaian SPM ini belum memenuhi target 100% karena masa pandemi COVID-19, sekolah dilakukan dengan Pembelajaran Jarak Jauh.

**F. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;**

Capain SPM ini belum memenuhi target 100% dikarenakan:

- (1) Kurangnya maksimalnya pelaksanaan deteksi dini PTM pada usia produktif
- (2) akses ke fasyankes sulit
- (3) pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas
- (4) usia produktif mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota
- (5) Sosial budaya

**G. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;**

Capaian SPM ini belum mencapai target 100% dikarenakan:

- (1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut
- (2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas
- (4) Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota
- (5) Terbatasnya biaya
- (6) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya
- (7) Ketersediaan sumber daya terbatas
- (8) Adanya kematian/mortalitas usia lanjut

**H. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;**

Capaian SPM ini belum mencapai 100% dikarenakan

- (1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan hipertensi
- (2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas
- (4) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya

**I. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;**

Capaian SPM ini lebih 100% dikarenakan

- (1) Sasaran berdasarkan proyeksi
- (2) Screening yang dilakukan cukup baik
- (3) Angka prevalensi DM meningkat

**J. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;**

PERMASALAHAN

- 1) Belum di temukan Pesein Gangguan Jiwa Berat sesuai Estimasi Jiwa di wilayah kerja Kabupaten yang belum mendapat pelayanan kesehatan jiwa.

- 2) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengobatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas di Tempat Layanan Kesehatan (Puskesmas).
- 3) Masih adanya Diskriminasi dan Stigma di Masyarakat tentang yang sakit Jiwa kena " Guna Guna " .
- 4) Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah terutama di daerah pedesaan
- 5) Kurangnya Dukungan Keluarga Pasien Gangguan Jiwa terhadap Perawatan & Pengobatan Kesehatan Jiwa
- 6) Kurangnya Dukungan Keluarga Pasien Gangguan Jiwa terhadap Perawatan & Pengobatan Kesehatan Jiwa
- 7) Programer / Penanggung Jawab Keswa merangkap jadi Programer Program lain ( kurang maksimal krn tugas & tanggung jawab terpecah dengan tugas lain )
- 8) Pelaksanaan Skreening pasien jiwa ke pelosok pelosok desa belum maksimal dan terkonsep dengan baik
- 9) Kerjasama dengan Lintas Sektor kurang maksimal
- 10) Promosi / sosialisasi Kesehatan Jiwa ke Pelosok - pelosok desa belum maksimal / kurang tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Gratis baik di tingkat Faskes Pratama
- 11) Banyaknya Program Program di Puskesmas sehingga ada yang perlu di prioritaskan
- 12) SDM Programer Keswa Puskesmas masih ada yang belum mendapat Pelatihan karena Pengganti dari Programer Lama
- 13) Adanya Kebijakan tuk wilayah Jawa Timur berupa PKP ( Penilaian Kerja Puskesmas ) untuk Tahun 2020 untuk Capaian Pelayanan Kesehatan Jiwa Berat minimal capaian 80 %

#### SOLUSI

- 1) Penyuluhan tentang Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Gratis di sosialisasikan ke masyarakat sampai ke pelosok pelosok desa untuk meningkatkan Pengetahuan masyarakat
- 2) Kerjasama Lintas Program Lintas Sektor di perkuat dalam hal Program Kesehatan Jiwa

- 3) Melibatkan Tokoh Masyarakat, Kader Kesehatan dan aparatur desa dalam kegiatan deteksi dini / skrening
- 4) Adanya Komitmen bersama dengan Lintas Program & Lintas Sektor
- 5) Kunjungan Rumah untuk Konseling Keluarga yang punya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa di tingkatkan
- 6) Di adakan pelatihan untuk semua Programer Kesehatan Jiwa untuk mengupdate ilmu yang terbaru dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 7) Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa dan Pelatihan dasar tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 8) Satu Programer memegang satu program di Puskesmas supaya fokus & konsentrasi pada tugasnya
- 9) Program Kesehatan Jiwa di masukkan ke Program Prioritas di Puskesmas
- 10) adanya Support Dana yang memadai
- 11) Metode Penyuluhan di kemas dengan menarik & dan bahasa yang mudah di pahami oleh masyarakat
- 12) Kepala Puskesmas memimpin langsung dalam hal skrening / deteksi dini
- 13) Adanya Tujuan Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam hal Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai SPM yang akan di capai
- 14) Terbentuknya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat ( TP - KJM ) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
- 15) Memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat seperti manusia tidak ada diskriminasi
- 16) Dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya

**K. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;**

Hal ini melebihi target 100% dikarenakan orang terduga tuberculosis menggunakan data proyeksi.

**L. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).**

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Capaian SPM ini belum mencapai target 100% dikarenakan

- (1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan HIV
- (2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas, dan dari puskesmas tidak dilaporkan ke aplikasi SiHA Online.
- (4) Adanya sasaran yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota
- (5) Terbatasnya biaya
- (6) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya
- (7) Ketersediaan sumber daya terbatas

#### SOLUSI

1. Harus ada peningkatan kerjasama antar bidang di dinas kesehatan (khususnya seksi p2ptm, seksi kpm, seksi promkes dan bidang yankes) agar kegiatan promosi serta edukasi khususnya ttg hiv aids lebih terpadu dan mencapai tujuan
2. Perlunya menjalin kerjasama dengan diskominfo sebagai wahana diseminasi informasi dan edukasi dalam pencegahan dan pengendalian hiv aids
3. Perlu digali peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan hiv aids (mendorong terbentuknya wahana semacam paguyuban peduli hiv aids dan lain sebagainya)

### **4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

#### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

#### b. Target dan realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan cipta karya	296.301	383.973	77,17
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan cipta karya	311.595	383.973	81,15

#### c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana
1	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari</b>	<b>Rp. 8.510.027.231,20</b>
-	Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih SPAM	Rp. 6.637.940.000,00
-	Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK PENUGASAN)	Rp. 1.872.087.231,20
2	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>	<b>Rp. 4.192.484.660,89</b>
	Pembangunan MCK/MWK	Rp. 3.894.984.660,89
	Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler)	Rp. 297.500.000,00

#### d. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	7
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	7

#### e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain

1. Di bidang produksi, PDAM tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi secara maksimal karena faktor keterbatasan air baku baik secara kualitas/ kuantitas dan sarana instalasi pengolahan air perlu perbaikan untuk dapat menambah kapasitas produksi.

2. Untuk jaringan distribusi, di beberapa jaringan distribusi sudah jenuh, sehingga tidak dapat ditambah pelanggan. Serta adanya jaringan yang berumur tua, sehingga sering terjadi kebocoran.

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Di bidang produksi, dilakukan perbaikan sarana prasarana Instalasi pengolahan air yang ada sehingga dapat beroperasi maksimal dan bekerjasama lintas sektoral untuk perbaikan kualitas air baku
2. Untuk jaringan perpipaan dilakukan rehabilitasi jaringan pipa yang sudah tua, pemasangan jaringan perpipaan baru, perbaikan sistem operasi distribusi (manajemen tekanan, pendeteksian dan perbaikan kebocoran secara cepat.
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk pengembangan pelayanan PDAM, termasuk dalam hal pembiayaan pemasangan jaringan sambungan rumah.
4. Melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat Menyusun database pelanggan.

#### 4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

##### a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

#### b. Target dan realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	BPBD	255	255	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-

#### c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	136.669.250
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	-

#### d. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

#### e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal
2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi

rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD
2. Memasukkan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

#### **4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS**

##### **SATPOL PP**

##### **5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten /Kota maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat mempunyai mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
- c. Standar Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada sebagaimana dimaksud diatas meliputi Pelayanan kerugian materiil dan Pelayanan Pengobatan.

## 5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Satpol PP Kabupaten Sumenep telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan program Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumenep dari segi penganggarnya pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 462.575.000,-
2. Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.719.181.300,-

Indikator :

- a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kab/Kota
- b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kab/Kota

## 5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Sumenep terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran sebagai berikut :

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi sebesar Rp. 462,575,000,-

Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dengan realisasi sebesar Rp. 1.674.565.636,-

## 5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol PP Kabupaten Sumenep untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 12,991,017,078,- ( Dua Belas Milyar

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

**5.4.1. Belanja Daerah Satpol PP Kab. Sumenep Rp. 12,991,017,078,-**

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi sebesar Rp.452,559,549,- dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dengan realisasi Rp. 1.674.565.636,-.

**5.4.2. Sumber dana lain Rp. -**

**5.5. Dukungan Personil**

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 didukung oleh personil sebanyak 190 orang Terdiri dari 75 PNS, 115 Banpol PP

**5.6. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan

Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli Wilayah se Kabupaten Sumenep. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai

Solusi

Mengajukan alokasi anggaran berkaitan dengan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Merencanakan untuk mengikutsertakan personil anggota Satpol PP Kabupaten Sumenep untuk mengikuti pendidikan PPNS.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**5.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar dalam kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, di antaranya :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang daerah rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

## 5.2. Target Pencapaian SPM

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Dengan sasaran :

- Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, dengan target sebesar 100% selama satu tahun.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dengan sasaran :

- Tersedianya data / informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi. Indikatornya adalah persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal, dengan target sebesar 100% paling lama satu tahun.
- Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan, dengan target 100% selama satu tahun.
- Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan, dengan target 100% selama satu tahun.

- Tersedianya layanan PUSDALOPS-PB dan sarana prasarana kesiapsiagaan dalam bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan PUSDALOPS-PB dan sarana prasarana penanggulangan bencana, dengan target 100% selama satu tahun.
  - Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan, dengan target 100% selama satu tahun.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Dengan sasaran :
- Terespon secara cepat setiap kali penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kurang dari 24 jam. Indikatornya adalah persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB, dengan target 100% selama satu tahun.
  - Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam. Indikatornya adalah persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana, dengan target 100% selama satu tahun.
  - Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh PUSDALOPS-PB dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana, dengan target 100% selama satu tahun.
  - Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana, dengan target 100% selama satu tahun.

### 5.3. Realisasi

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana meliputi Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, ditargetkan sebesar 100% dan mencapai realisasi sebesar 100%.

- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR); Operasional SAR Speed Boat; Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana; Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial dan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB), ditargetkan sebesar 100% dan mencapai realisasi sebesar 100%.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  
 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana meliputi kegiatan Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana, ditargetkan sebesar 100% dan mencapai realisasi sebesar 100%.

#### 5.4. Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

Tabel 4.5.1

Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
	<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>5.317.404.014</b>	<b>APBD</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.683.618.150</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>	<b>534.342.900</b>	<b>APBD</b>
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	APBD
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.400.000	APBD
1.3	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	3.597.000	APBD
1.4	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	20.298.000	APBD

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1.5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.570.000	APBD
1.6	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.600.000	APBD
1.7	Kegiatan Makanan dan Minuman	13.608.000	APBD
1.8	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	83.841.600	APBD
1.9	Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar	0	APBD
1.10	Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	168.512.500	APBD
1.11	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	12.000.000	APBD
1.12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	10.000.000	APBD
1.13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	91.265.800	APBD
1.14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	7.650.000	APBD
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD</b>
2.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	APBD
2.2	Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	0	APBD
<b>3</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.700.000</b>	<b>APBD</b>
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	2.090.000	APBD
3.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.610.000	APBD
<b>4</b>	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>657.976.000</b>	<b>APBD</b>
4.1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)	287.524.000	APBD
4.2	Kegiatan Operasional SAR Speed Boat	242.880.000	APBD
4.3	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	39.696.000	APBD
4.4	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana	87.876.000	APBD
<b>5</b>	<b>Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik</b>	<b>339.930.000</b>	<b>APBD</b>

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
5.1	Kegiatan Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana	214.830.000	APBD
5.2	Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	125.100.000	APBD
<b>6</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<b>136.669.250</b>	<b>APBD</b>
6.1	Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial	136.669.250	APBD
<b>B</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.633.785.864</b>	<b>APBD</b>

### 5.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2020:

1. Jumlah Pegawai :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep sebanyak 26 orang.

2. Kualifikasi Pendidikan :

- SMP : 2 orang ;
- SMA : 8 orang ;
- S1 : 10 orang ;
- S2 : 5 orang ;
- S3 : 1 orang .

3. Pangkat dan Golongan :

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang ;
- Pembina (IV/a) : 2 orang ;
- Penata Tingkat I (III/d) : 9 orang ;
- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 4 orang ;
- Penata Muda (III/a) : 4 orang ;
- Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang ;
- Pengatur (II/c) : 3 orang ;
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang ;
- Juru (I/c) : 1 orang ;

4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional :

- Eselon II B : 1 orang ;
- Eselon III B : 3 orang ;
- Eselon IV A : 8 orang.

### 5.6. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari permasalahan atau hambatan, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Dibawah ini beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2020, antara lain:

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana komunikasi antar kecamatan utamanya kecamatan kepulauan;
- b) Regulasi tentang pembatasan kepada OPD yang tidak dikecualikan untuk penganggaran honorarium kegiatan sehingga kegiatan keposkoan dan Tim Dala BPBD tidak bisa terserap, hal ini tentunya berpengaruh kelancaran kegiatan dilapangan.

2) Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut diatas, diperlukan upaya-upaya pemecahan, antara lain sebagai berikut :

- 1. Perlunya sarana alat komunikasi di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumenep khususnya di wilayah kecamatan/daerah rawan bencana dan kecamatan kepulauan.
- 2. Mengusulkan kepada TAPD agar kegiatan ke Poskoan dan honorarium Tim Dala tetap diadakan sehingga setiap ada kejadian bencana mereka dapat sigap turun kelapangan.

## 4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sedangkan untuk bidang sosial diatur dalam Permensos no. 09 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal bidang sosial.

### 6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang social di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota

### 6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target
1	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di luar panti	100% selama 1 tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	100% selama 1 tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan

## 6.3 Realisasi

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di luar panti	<p>X = jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>Y = Populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> $\frac{X}{Y} \times 100\%$	$\frac{250}{250} \times 100\% = 100\%$ 250
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	<p>X = jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Y = populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota</p> $\frac{X}{Y} \times 100\%$	$\frac{133}{133} \times 100\% = 100\%$ 133

## 6.4 Alokasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi dan peningkatan motivasi bagi lanjut usia	39.530.000,-
		2. Asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)	409.970.000,-
		3. Pembinaan dan bantuan bagi penyandang disabilitas	105.048.200,-
		4. Asistensi sosial penyandang disabilitas berat	109.430.000,-
		5. Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial	225.000.000,-
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan pembinaan Kampung Siaga Bencana	207.852.300,-
		2. Pencegahan dan penanganan konflik sosial	16.817.700,-

## 6.5 Dukungan Personil

Dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, didukung dengan personil sebanyak 19 orang.

No.	Nama	Jabatan
1	KUSYADI, S. Sos, M. Si	Sekretaris
2	Drs. FAJARISMAN, MH	Kabid Rehabilitasi Sosial
3	H. ARIES DEDY SUGIARTO, S.Sos	Kasi Rehab Sosial Penyandang Disabilitas
4	ASTUTIK AMRIYANI, S.Sos, M.Si	Kasi Rehab Sosial Tuna Sosial
5	SRI WAHYUNI, SE	Kasi Rehab Sosial anak dan lanjut usia
6	NORI SELFIANA	Staf bidang rehsos
7	SAWAWI	Staf bidang rehsos
8	SYAMRAWI, SH	Kabid perlindungan dan Jaminan Sosial
9	AHMAD FAUZI, S. Sos, M. Si	Kasi Jaminan Sosial Keluarga
10	HADI KUSNO BOWO	Kasi Korban Bencana Sosial
11	MARDIANA, SE, M. Si	Kasi Korban Bencana Alam
12	FESTI ARMIYATI	Staf Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
13	ZAINAL ARIFIN	Staf Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Nama	Jabatan
14	TUSNANINGSIH	Staf Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
15	SURYA CAHYADI BURHAN	Staf Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
16	Drs. AHMAD NOSIRWAN	Kepala UPT Rumah Perlindungan Sosial
17	JUNAIDI	Staf UPT RPS
18	FATHORRAHMAN	Staf UPT RPS

## 6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam usaha pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumenep adalah banyaknya populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya.

Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan peran serta masyarakat secara umum, khususnya dunia usaha untuk ikut terlibat dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## 4.7 Program dan Kegiatan

### 4.7.1 DIKNAS

Berdasarkan pengelompokan pembiayaan yang tidak terserap sampai dengan 100% yakni pada Program dan Kegiatan :

1. Program Peningkatan Akses PAUD, yakni pada :
  - a. Pembangunan Gedung/Sarana PAUD (DAK) (terserap 97,22%)
2. Program Peningkatan Akses SD, yakni pada:
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK) ( terserap 98,61%)
3. Program Peningkatan Akses SMP, yakni pada :
  - a. Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah SMP (DAK) ( terserap 98,12%)
4. Program Peningkatan Akses PNF, yakni pada :
  - a. Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A,B dan C ( tidak terserap)
  - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Pintar (terserap 67,54%)
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK) ( terserap 87,28%)

5. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yakni pada :
  - a. Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF (tidak terserap)
  - b. Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD (terserap 32,93%)
  - c. Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SMP (terserap 100%)
  - d. Fasilitas Kategori II (terserap 98,17%)
6. Program Peningkatan Kualitas PAUD, yakni pada :
  - a. Pengembangan Kurikulum (tidak terserap)
  - b. BOP Penyelenggaraan PAUD (tidak terserap)
  - c. Pembangunan Karakter Peserta Didik PAUD (tidak terserap)
  - d. Fasilitas Akreditasi PAUD (tidak terserap)
7. Program Peningkatan Kualitas SD, yakni pada :
  - a. Bimbingan Teknis Kurikulum SD (terserap 100%)
  - b. Fasilitas Akreditasi SD (terserap 91,81%)
  - c. Olimpiade dan Festival SD (terserap 89,57%)
  - d. Fasilitas Penyelenggaraan PPDB SD (terserap 97,72%)
  - e. Fasilitas Ujian SD (terserap 99,39%)
  - f. Wajib Diniyah SD (terserap 98,89%)
  - g. Fasilitas SD Rujukan Mutu (terserap 99,22%)
  - h. Monev dan Sarana dan Prasarana SD (terserap 100%)
  - i. Bantuan Operasional Sekolah Dasar (terserap 35,27%)
8. Program Peningkatan Kualitas SMP, yakni pada :
  - a. Bimbingan Teknis Kurikulum SMP (terserap 98,56%)
  - b. Fasilitas Akreditasi SMP (terserap 100%)
  - c. Olimpiade dan Festival SMP (terserap 99,38)
  - d. Apresiasi dan Seni Pameran Pendidikan SMP (terserap 23,52%)
  - e. Fasilitas Penyelenggaraan PPDB SMP (terserap 100%)
  - f. Fasilitas Ujian SMP (terserap 90,70%)
  - g. Lomba Penguatan Pendidikan Karakter (terserap 15,92%)
  - h. Wajib Diniyah SMP (terserap 93,36%)
  - i. Fasilitas SMP Rujukan Mutu (terserap 100%)
  - j. Bantuan Operasional SMP (terserap 41,74%)

9. Program Peningkatan Kualitas PNF, yakni pada :
  - a. Apresiasi Seni dan Pameran PNF (terserap 36,41%)
  - b. Hari Aksara Internasional (HAI) (tidak terserap)
  - c. BOP Bosda Madin (terserap 93,46%)

#### **4.7.2 URUSAN KESEHATAN**

- a. Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak
  - Peningkatan kesehatan ibu dan anak
  - Peningkatan dan perbaikan gizi
    - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
- b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
  - Pelayanan kesehatan anak remaja dan usia lanjut
- c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - Peningkatan pencegahan penanggulangan penyakit menular
    - Pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular
    - Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
    - Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
    - Peningkatan pencegahan dan pelayanan kesehatan jiwa
- d. Program standarisasi pelayanan kesehatan
  - Peningkatan kesehatan masyarakat melalui BOK

#### **4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

- a. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
  - Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih SPAM
  - Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK PENUGASAN)
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik
  - Pembangunan MCK/MWK
  - Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler)

#### **4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

- a. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial

#### **4.7.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **SATPOL PP**

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi dengan kegiatan
- Penyediaan Jasa surat menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air.
  - Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor.
  - Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran .
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyediaan Makanan dan Minuman .
  - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
  - Peringatan Hari-Hari Besar .
  - Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
  - Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor / rumah dinas
  - Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas
- b. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan adalah:
- Pendidikan dan Pelatihan
  - Pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian
- c. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Laporan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan adalah
  - Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP
  - Pemantapan kemampuan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
- d. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran
- e. Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Penegakan Perda dan Peraturan Bupati
  - Penegakan disiplin PNS

#### **4.7.6 URUSAN SOSIAL**

- a. Program Rehabilitasi Sosial
  - Rehabilitasi dan peningkatan motivasi bagi lanjut usia
  - Asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)
  - Pembinaan dan bantuan bagi penyandang disabilitas
  - Asistensi sosial penyandang disabilitas berat
  - Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan pembinaan Kampung Siaga Bencana
  - Pencegahan dan penanganan konflik sosial

## **P E N U T U P**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan salah satu Laporan Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat/ Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut merupakan akhir proses manajemen Pemerintah Daerah dari satu periode Tahun Anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kebijakan program dan kegiatan.

Pada dasarnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub-sub sistem Penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip - prinsip good governance dan clean governance yaitu Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan pelayanan publik.

Demikianlah gambaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, dengan harapan bahwa pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang secara nyata dapat diterima oleh masyarakat, sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan.

Sumenep, 25 Maret 2021

 **BUPATI SUMENEP**  
  
**ACHMAD FAUZI, SH, MH**

## P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan salah satu Laporan Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat/ Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut merupakan akhir proses manajemen Pemerintah Daerah dari satu periode Tahun Anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kebijakan program dan kegiatan.

Pada dasarnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub-sub sistem Penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip - prinsip good governance dan clean governance yaitu Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan pelayanan publik.

Demikianlah gambaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, dengan harapan bahwa pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang secara nyata dapat diterima oleh masyarakat, sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan.

Sumenep, 25 Maret 2021

 **BUPATI SUMENEP**  
  
**ACHMAD FAUZI, SH, MH**